

## BAB III

### PERANAN PARTAI POLITIK TERHADAP INTEGRASI NASIONAL

#### III.1. Partai Politik Indonesia dari Masa ke Masa

Aspek politik digunakan sebagai studi pendekatan disini, namun tanpa dikaitkan dengan sejarah bisa membuat uraian dan analisisnya menjadi gersang, bahkan dapat menyebabkan kehilangan makna karena akan kehilangan konteks waktu dan bisa lepas dari akarnya. Bagaimanapun sejarah lahirnya parpol modern merupakan rangkaian proses dari perubahan sosial ekonomi - politik dari masyarakat dimana partai itu hadir. Korelasi ini terkait dengan perkembangan Parlemen dan meluasnya hak pilih, untuk kemudian menyebar dan diadopsi oleh hampir semua negara modern, termasuk negara berkembang yang memperoleh kemerdekaan setelah Perang Dunia kedua. Artinya, partai dan sistem kepartaian di negara berkembang seperti Indonesia relatif masih baru dikenal didalam masyarakatnya. Bagaimanapun sifat dan ciri-ciri dari suatu masyarakat akan berpengaruh pada tingkah laku partai didalam kehidupan sosial dan politiknya secara timbal-balik. Dengan demikian studi perlu dilakukan dengan pembabakan sejarah untuk menganalisa fungsi integrasi dari parpol selama kurun waktu tertentu. Pembabakan peristiwa akan didasarkan pada orde politik untuk memudahkan korelasi antara berbagai fenomena.

##### III.1.1. Era Pra Kemerdekaan

Kemunculan parpol di Indonesia terkait erat dengan perubahan sosial politik dan ekonomi di negeri Belanda maupun Indonesia (Hindia Belanda) sendiri. Kita mengetahui bahwa tumbuhnya partai di Indonesia merupakan resultante dari perubahan sosial politik dan ekonomi dipenghujung abad XIX dan awal abad XX. Titik pangkal paling relevan mengenai proses ini adalah *Politik Etis* dan *Kebangkitan Nasional* di Indonesia. Aspek terpenting dari politik etis adalah sistem pendidikan modern (Barat) bagi kaum Bumi Putera. Kalaupun tujuan pendidikan tidak murni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia karena sekedar untuk memenuhi tuntutan kebutuhan administratur dan birokrasi kolonial tingkat rendahan. Namun politik etis membawa konsekuensi lebih jauh seiring dengan tumbuhnya kesadaran nasional dikalangan kaum Bumi Putera yang berkenalan dengan sistem pendidikan modern.

Dalam kurun waktu yang hampir bersamaan dengan perubahan sosial ekonomi - politik di Hindia Belanda, ternyata di Timur Tengah terjadi pergolakan pemikiran atas kebangkitan kembali (*renaissance*) Islam. Arus pemikiran dimotori oleh Jamaluddin Al

Afghani dan Muhammad Abduh. Arus pemikiran Islam tersebut kemudian masuk ke Indonesia melalui sejumlah umat Islam yang bermukim di Mekkah atau jemaah haji dari Indonesia. Meningkatnya jemaah haji dari Indonesia didorong oleh meningkatnya arus pelayaran ke Timur Tengah seiring dengan dibukanya Terusan Suez.<sup>1</sup> Akibatnya, dikalangan umat Islam Indonesia mulai tersebar arus pemikiran modernisasi dan reformasi pemikiran Islam. Jadi masuknya dua arus pendidikan modern dari Barat dan dari Timur ke Indonesia telah melahirkan suatu proses perubahan sosial bagi regenerasi kesadaran rakyat. Perubahan itu sangat besar pengaruhnya bagi masa depan Indonesia didalam proses integrasi nasional.

Tonggak pertama yang dipancarkan oleh perubahan tersebut adalah kebangkitan nasional - ditandai dengan lahirnya Budi Utomo tahun 1908. Tiga tahun setelah itu, HOS. Tjokroaminoto mendirikan Sarekat Islam (SI) sebagai kelanjutan dari Sarekat Dagang Islam yang diprakarsai H. Syamanhudi di Solo tahun 1905. Kalaupun Sarekat Dagang Islam hanya bertujuan untuk mempersatukan pedagang pribumi (khususnya pedagang batik) guna menghadapi persaingan dengan pedagang Cina namun dibawah pimpinan Tjokroaminoto - SI berubah menjadi organisasi politik dengan tujuan yang lebih luas dan jauh ke depan, dimana Islam menjadi landasan serta pendorong bagi tingkah laku dan perjuangannya. Hal lain yang membedakan antara SI dengan Budi Utomo adalah sifat keanggotaan. Anggota Budi Utomo berkisar diantara bangsawan rendahan dan hanya meliputi Jawa – Madura. Jadi berbeda dengan keanggotaan SI yang jangkauannya relatif lebih luas. Namun begitu SI dan Budi Utomo dapat dipandang sebagai cikal-bakal lahirnya parpol di Indonesia.

Selain akibat tidak langsung dari politik etis - perjuangan politik para tokoh pergerakan tidak bisa dipisahkan dari adanya peran langsung aktivis politik orang-orang Indo - Belanda sendiri. Realitas ini tampak dari peran seorang Indo Eropa bernama E.F.E. Douwes Dekker (*Setiabudhi*) keluarga jauh dari Eduard Douwes Dekker (*Multatuli*). E.F.E. Douwes Dekker mendirikan partai politik bersama dengan dua orang Jawa, Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Surjaningrat (Ki Hajar Dewantara) pada 1911. Partai ini

---

<sup>1</sup> Jumlah orang Indonesia yang menunaikan ibadah haji pada tahun 1875 lebih dari 4.000 orang, tahun 1895 lebih dari 8.000 orang, tahun 1900 menurun menjadi 7.421 orang dan mencapai puncak tertinggi selama era penjajahan Belanda pada tahun 1926 yaitu 52.412 orang. Di masa kemerdekaan, jumlah orang Indonesia yang menunaikan ibadah haji pada tahun 1951 sebanyak 1.843 orang, tahun 1964 sejumlah 15.000 orang dan terus mengalami peningkatan pasca 1965, misalnya pada tahun 1975 sebesar 65.000 orang. Deliar Noer, *Partai Islam Di Pentas Politik Nasional*, Bandung: Penerbit Mizan, 2000. Hal. 3.

diberi nama *Indische Partij* (IP : Partai Hindia). *Indische Partij* merupakan organisasi campuran yang menginginkan kerjasama antara orang Indo dengan Bumiputra. Akan tetapi pada tahun 1913 ketiga orang tersebut diasingkan ke Negeri Belanda. Ditangkapnya tiga orang tokoh IP tidak menimbulkan kevakuman gerakan radikal, sebab tahun 1913 H.J.F.M. Sneevliet tiba di Indonesia. Sneevliet merupakan agen Komunis Internasional (komintern) di Cina dengan nama samaran G. Maring. Jadi tidak mengherankan apabila aktivitas radikal Sneevliet menyebar ke Indonesia setelah mendirikan "*Indische Social Democratische Partij*" (ISDV: Perserikatan Sosial Demokrat Hindia) di Semarang.<sup>2</sup> Partai ini berusaha memperoleh dukungan dari kalangan rakyat. Singkat cerita, seorang pemuda Jawa yang menjadi buruh Kereta Api di Surabaya bergabung, Semaun. Semaun adalah anggota SI, ia bertemu dengan Sneevliet di "*Vereniging Spoor en Tramweg - Personeel*" (VSTP: Serikat Buruh Kereta Api dan Trem) Semarang. Setelah Sneevliet ditahan kemudian ISDV dipimpin oleh Semaun dan Darsono. Pada Mei 1920 ISDV berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).<sup>3</sup>

Sementara diluar SI dan ISDV tengah berlangsung gerakan pembaharuan Islam yang bermula dari masalah *ubudiyah* (masalah ibadah kepada Allah swt), akan tetapi kemudian memasuki masalah - masalah *muamalah* (hubungan manusia / kemasyarakatan), terutama masalah kebijakan organisasi maupun sikap perorangan terhadap penguasa kolonial. Arus renaissance Islam pun memberikan pengaruh kepada sebagian pimpinan SI. Adalah H. Agus Salim yang banyak mendapat dukungan dari umat Islam perkotaan. Suatu kenyataan yang telah menimbulkan kontradiksi tersendiri di internal SI. Akibatnya, perpecahan demi perpecahan pun kemudian datang silih berganti. Selain perbedaan pandangan mengenai Islam, ternyata pengaruh Marxisme berhasil menerobos masuk kedalam SI sehingga kemudian melahirkan PKI pada tahun 1920. Tidak hanya itu, SI kembali mengalami pertentangan pada tahun 1923 akibat adanya perbedaan pandangan antara kelompok Abikusno Tjokrosujoso dengan kelompok H. Agus Salim atas "*Politik Hijrah*". Kelompok H. Agus Salim menghendaki SI meninjau kembali politik hijrah yang non koperatif terhadap penguasa kolonial, berbeda dengan kelompok Abikusno Tjokrosujoso yang berpendapat sebaliknya.<sup>4</sup> Kemudian pertentangan

<sup>2</sup> Sneevliet: dari Belanda Menebar Benih Radikalisme di Indonesia, <http://www24.brinkster.com/Indomarxist/sneevliet.htm>

<sup>3</sup> G. McT. Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press, 1954; Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2001. hal 38-42; M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Dharmo Hardjowidjono), Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.

<sup>4</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta : LP3ES, 1980, Hal. 159-160.

dan perpecahan intern pun tidak dapat dihindarkan. Akibat perpecahan yang berlarut-larut itu peranan SI makin merosot sampai ke titik kritis, bahkan kewibawaannya hampir hilang sama sekali.

Bersamaan dengan terdegradasinya peranan SI mulai bermunculan partai-partai sekuler (netral agama) seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) pimpinan Ir. Soekarno, Partai Indonesia Raya (Parindra) pimpinan M. Husni Thamrin. Disamping kehadiran partai - partai Islam seperti Partai Islam Indonesia (PII) yang didirikan oleh Sukiman, sampai kemudian Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) sebagai cikal bakal Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).<sup>5</sup> Hadirnya Masyumi sangat terkait erat dengan pendudukan Jepang di Indonesia. Sebab pada masa pendudukan Jepang kegiatan parpol dilarang - hanya golongan Islam saja yang diberi kebebasan membentuk Masyumi.<sup>6</sup>

Partai Nasional Indonesia merupakan kelanjutan dari *Algemeene Studieclub* yang didirikan oleh Ir. Soekarno dan kawan-kawannya di Bandung pada bulan Nopember 1925. *Algemeene Studieclub* merupakan suatu organisasi yang bersifat politis dengan kemerdekaan bagi Indonesia sebagai tujuan. Baru pada 4 Juli 1927 Ir. Soekarno bersama dengan Anwari, Sartono, dan teman-temannya di *Algemeene Studieclub* memprakarsai berdirinya parpol baru bernama *Perserikatan Nasional Indonesia*, dimana Ir. Soekarno menjadi ketua. Pada Mei 1928 perserikatan itu berubah nama menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI). PNI bertujuan mencapai kemerdekaan secara penuh dengan memakai metode non kooperatif dan berdasarkan garis massa.

Peran PNI dengan partai-partai pra kemerdekaan yang amat penting bagi integrasi nasional adalah terjadinya persatuan dari Partai Sarekat Islam, Budi Utomo, Studieclub Surabaya, PNI, serta organisasi-organisasi kedaerahan dan Kristen ke dalam satu wadah, yaitu *Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)*. Walaupun kerjasama itu hanya bersifat sementara akan tetapi menjadi awal tumbuhnya konsepsi nasionalisme secara umum - yaitu suatu nasionalisme berdasarkan kesetaraan antara suku Jawa dan bukan Jawa, antara Islam dan non Islam, antara mayoritas dan minoritas yang sama memiliki hak atas hidupnya sendiri.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Nama Masyumi dimasa kemerdekaan bukan singkatan sebagaimana halnya di era penjajahan Jepang. *Op.Cit.* Deliar Noer, 51: 2000.

<sup>6</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia, 1991, hal. 170

<sup>7</sup> Diperkirakan bahwa pada tahun 1905 terdapat 35 juta orang muslim diantara 37 juta penduduk dan pada tahun 1965 terdapat 5.531.026 penduduk beragama Kristen dan 2.000.000 beragama Katolik ditengah penduduk yang berjumlah 106.972.000. Data selengkapnya lihat *Op.Cit.*, Deliar Noer, 2 : 2000.

Secara umum partai-partai era pra kemerdekaan menolak kolonialisme yang dijalankan oleh Belanda dan mencitakan suatu negara berdaulat. Kesadaran itu didorong oleh praktek kolonialisme yang eksploitatif. Akibatnya, ketegangan antara pimpinan Islam, elit priyai dan kalangan pergerakan dengan penguasa kolonial makin meningkat. Kalaupun benturan ideologis tetap tidak terhindarkan diantara partai-partai. Benturan ideologi timbul akibat dari persepsi Islam politik yang memandang ideologi nasionalisme / sekuler (netral agama) tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bagaimanapun Islam politik berkeyakinan bahwa Islam merupakan kebenaran hakiki dan *khaffah*. Konsekuensinya, kelompok nasionalis (sekuler) dan Islam sering terpecah-pecah.<sup>8</sup> Suatu kesadaran yang terbawa sampai ke sidang-sidang BPUPKI dan Konsituante pada saat mempersiapkan dasar - dasar Indonesia merdeka. Bahkan sempat berkembang menjadi separatisme. Selain pertentangan ideologi antara kelompok sekuler (baik nasionalis maupun kosmopolitan) dengan kelompok agama, pertentangan lain yang cukup menonjol adalah sikap koperatif dan non koperatif dengan penguasa kolonial.<sup>9</sup>

Mengenai peran dan fungsi partai era pra kemerdekaan, kiranya pandangan Ir. Soekarno dibawah ini dapat memberikan gambaran:

“Bagaimanakah kita bisa mendjelmakan pergerakan jang onbewust dan ragu-ragu mendjadi pergerakan jang bewust dan radikal? Dengan suatu partai! Dengan suatu partai jang mendidik Rakjat-djelata itu kedalam ke-bewust-an dan keradikalan. Dengan suatu partai, jang menuntun Rakjat-djelata itu didalam perdjalanannya kearah kemenangan, mengolah tenaga Rakjat - djelata itu didalam perdjoangannya sehari-hari,-mendjadi pelopor daripada Rakjat-djelata itu didalam menudju kepada maksud dan tjita-tjita”.<sup>10</sup>

Jadi peran parpol pra kemerdekaan sangat mengedepankan fungsi artikulasi, agregasi, disamping sebagai sarana sosialisasi (pendidikan), mobilisasi, sekaligus rekrutmen elit pergerakan, dan simbol integrasi.<sup>11</sup>

### III.1.2. Era Demokrasi Liberal

Demokrasi Liberal ditandai dengan terbitnya Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 3 Nopember 1945. Maklumat berisi anjuran pemerintah agar masyarakat

<sup>8</sup> Umaidi Radi, *Strategi PPP 1973-1982 : Suatu Studi Tentang Kekuatan Politik Islam Tingkat Nasional*, Jakarta: Integrita Perss, 1984, hal. 42-41.

<sup>9</sup> Kendati Volksraad (Dewan Rakyat) sudah terbentuk pada akhir Desember 1916 tetapi kelompok non koperatif menolak keberadaannya dan tidak bersedia masuk didalamnya. Maka pada konteks ini, peranan partai politik pra kemerdekaan sangat dominan didalam mewujudkan integrasi nasional.

<sup>10</sup> Soekarno, “Mencapai Indonesia Merdeka”, *Dibawah Bendera Revolusi*, Djakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1965, hal. 282.

<sup>11</sup> Pipit R. Katawidjaja, dan Mulyana W. Kusumah, *Kisah Mini Sistem Kepartaian*, Berlin: Closs, 2003. hal 107-108.

membentuk partai - partai politik.<sup>12</sup> Adapun maksud dari maklumat ialah perlunya partisipasi rakyat guna memperkuat perjuangan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Artinya, peran parpol dititik beratkan pada fungsi pengintegrasikan kedaulatan negara. Maklumat Wakil Presiden tersebut sekaligus menolak kemungkinan Indonesia menganut sistem partai tunggal (*state party*) yang telah didiskusikan dan dirancang oleh Komite Nasional. Maka sejak itu dimulailah sistem politik multi partai. Dengan maklumat tersebut, antara tahun 1945 - 1950 telah berdiri 25 parpol. Keluarnya Maklumat sekaligus memaksakan sistem Parleментар ditengah sistem Presidensial yang diharuskan oleh UUD'45. Karena sistem multi partai menurut Miriam Budiardjo dianggap sebagai cermin keanekaragaman dari komposisi masyarakat yang heterogen, dimana perbedaan ras, agama, atau suku bangsa sangat kuat. Timbulnya parpol sebagai institusi yang mendasarkan diri pada ideologi telah diikuti pula oleh suatu kesadaran politik akan pentingnya ideologisasi bagi masyarakat. Dengan begitu sistem politik multi partai dianggap dapat mencerminkan keanekaragaman budaya dan politik. Tetapi pada kenyataannya masyarakat cenderung menyalurkan ikatan-ikatan primordial ke dalam satu wadah.<sup>13</sup>

Sistem multi partai yang bergandengan dengan sistem pemerintahan parlementer memiliki kecenderungan untuk menitik beratkan pada lembaga legislatif. Sehingga peranan eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Situasi demikian telah memicu berbagai gerakan sparatis di tanah air karena tidak ada satu partai pun yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri. Sebab setiap parpol terpaksa membentuk koalisi dengan partai-partai lain. Akibatnya Kabinet seringkali tidak berumur panjang karena partai koalisi harus selalu mengadakan musyawarah dan kompromi dengan partai-partai lain ditengah segala macam kemungkinan, termasuk dari kemungkinan bahwa partai

<sup>12</sup> Isi dari Maklumat X tanggal 3 Nopember 1945 adalah; "berhubung dengan usulan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat kepada Pemerintah, supaya diberikan kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik, dengan restriksi, bahwa partai-partai itu hendaknja memperkuat perjuangannya untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjjamin keamanan masyarakat, Pemerintah menegaskan pendiriannya yang telah diambil beberapa waktu yang lalu bahwa: 1. Pemerintah menjukai timbulnja partai-partai politik, karena dengan adanya partai-partai politik itulah segala aliran faham yang ada dalam masyarakat dapat dipimpin ke djalan yang teratur; 2. Pemerintah berharap supaya partai-partai politik telah tersusun, sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota Badan-badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946."

<sup>13</sup> Ikatan primordial adalah sesuatu yang berakar pada hal-hal yang eksistensinya selalu berada ditengah masyarakat, terutama rasa kebersamaan dan hubungan kekerabatan. Lebih daripada itu, ia bisa bersumber pada lahirnya seseorang didalam komunitas keagamaan tertentu dan mentaati praktek-praktek sosial tertentu. Kesamaan - kesamaan darah, bahasa, adat kebiasaan dan lain sebagainya - yang dihayati dapat mengandung daya paksa karena timbul dari keberadaannya yang kuat. Lihat, Clifford Geertz, "The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civic Politics in The New State", dalam *The Interpretation of Culture*, New York : Basic Book, 1973, hal. 173.

pendukung koalisi akan menarik dukungannya. Sementara partai oposisi pun kurang memainkan peran yang jelas karena sewaktu - waktu mereka dapat diajak untuk membentuk koalisi baru dalam pemerintahan. Hal semacam ini menyebabkan sering terjadi siasat yang berubah-ubah menurut kepentingan situasi yang dihadapi setiap saat. Dengan begitu maka stabilitas politik sulit diciptakan. Berbeda halnya jika terdapat satu partai dominan, maka stabilitas politik dapat dijamin.

Dengan demikian sistem kepartaian kembali ke pola multi partai seperti pada jaman kolonial dimana pertentangan ideologi kerap kali timbul. Singkatnya, sistem multi partai tidak menguntungkan bagi berkembangnya pemerintahan yang stabil - terutama bagi negara yang amat plural. Walaupun pemilu pada tahun 1955 memberi penyederhanaan bagi sejumlah partai karena dengan jelas telah memunculkan 4 parpol besar, yakni PNI, Masyumi, NU dan PKI. Akan tetapi parpol tetap tidak dapat menyelenggarakan fungsinya sebagaimana yang diharapkan akibat pertentangan diantara mereka. Sampai pada akhirnya peranan parpol dipersempit ruang geraknya - ditandai dengan lahirnya Demokrasi Terpimpin. Lahirnya Demokrasi Terpimpin menurut Daniel S. Lev karena,

“Sistem partai di Indonesia menunjukkan beberapa gejala kekacauan yang tidak asing bagi sistem multi partai di dunia. Ada partai kecil yang mempunyai pengaruh yang jauh lebih besar daripada dukungannya didalam masyarakat; Disamping itu tidak ada partai yang mengembangkan sikap memikul tanggungjawab penuh seperti yang biasanya terdapat pada partai yang menguasai pemerintahan tanpa koalisi. Lagi pula, sistem parlementer (di Indonesia) tidak pernah memiliki kekuasaan sepenuhnya, kewenangan dan kekuasaan dalam tata tertib politik, dan juga tidak dapat menguasai segala aspek situasi konflik politik. Pada akhirnya pemerintahan parlementer dijatuhkan oleh kekuatan ekstra parlementer seperti Presiden dan Tentara. Akan tetapi partai politik tidak luput dari tantangan dari kalangan mereka sendiri. Dan hal ini juga membantu timbulnya Demokrasi Terpimpin”.<sup>14</sup>

Begitulah kenyataan politik nasional selama Demokrasi Liberal yang direpresentasikan oleh parpol, dimana kendali penuh mereka atas pemerintahan tidak cukup mampu mewujudkan suatu stabilitas politik akibat tidak ada partai dominan.

### III.1.3. Era Demokrasi Terpimpin

Kekacauan demi kekacauan yang berlangsung selama Demokrasi Liberal menimbulkan kesadaran berbagai pihak akan arti penting stabilitas politik pemerintahan,

---

<sup>14</sup> Daniel S. Lev, "Political Parties in Indonesia", dalam *Party Systems of Southeast Asia*, Terbitan Khusus dari *Journal of Southeast Asian History*, Maret 1967, hal. 58; dalam *Op.Cit.* Miriam Budiardjo, 1991.



misalnya saja rapat TNI AD pada bulan Agustus 1958. Dalam rapat persiapan operasi militer terhadap PRRI ini diputuskan:

“Dalam menumpas pemberontakan, Angkatan Perang Republik Indonesia berdasarkan pelaksanaan tugas mereka pada keyakinan bahwa sesudah itu tidak akan terulang lagi ekses - ekses politik dari masa lampau - seperti “dagang sapi”, mempolitikkan masalah ekonomi dan dinas pegawai negeri, dan sebagainya. Ekses-ekses yang busuk itu yang merupakan penyebab pokok kesulitan-kesulitan kita. TNI sudah bertekad, sesudah pemberontakan ini, untuk memusatkan kekuatannya pada usaha menertibkan hukum dan disiplin, dan membenahi organisasi negara, baik sipil maupun militer. Pemerintah harus menjamin bahwa, setelah pemberontakan dapat ditumpas, ia akan meningkatkan upaya-upayanya (untuk memperbaiki keadaan) dibidang ekonomi daerah dan pembangunan nasional”.<sup>15</sup>

Kondisi politik selama Demokrasi Liberal telah menimbulkan kesadaran bersama antara A.H. Nasution dengan Presiden Soekarno yang didasarkan pada komitmen mereka kepada nasionalisme dan patriotisme. Mereka pun menghidupkan kembali “jiwa revolusi” dan menentang politik kepartaian yang memecah-belah.<sup>16</sup> Sebab pemilu tidak dapat melahirkan suatu kestabilan politik. Bung Karno pun menolak demokrasi Barat, bahwa “50 persen ditambah satu selalu benar.” Untuk itu ia menyerukan agar Indonesia kembali kepada paham demokrasinya sendiri yang didasarkan pada musyawarah mufakat, gotong royong dan bimbingan, sampai pada akhirnya muncullah Demokrasi Terpimpin.

Dengan demikian parpol mulai direkonstruksi sedemikian rupa agar sesuai dengan jiwa revolusi dan jati diri bangsa. Kebijakan itu bertolak dari situasi nasional yang tidak dapat memberikan stabilitas politik dan cenderung mendorong terjadinya disintegrasi. Suatu kondisi yang disebut oleh Bung Karno sebagai “penyakit partai-partai”. Ketika memberikan pidato pada tanggal 28 Oktober 1958 Presiden mengemukakan:

“Kita telah melakukan kesalahan yang sangat besar dalam 1945 ketika kita menyerukan pembentukan partai-partai, partai-partai, partai-partai. ... mimpi saya adalah bahwa para pemimpin partai-partai itu akan bertemu, akan berkonsultasi satu sama lain, lalu bersama-sama sampai kepada keputusan “mari kita sekarang bersatu mengubur semua partai”. ... Saya tahu bahwa para pemuda yang mempunyai kesadaran politik benar-benar menginginkan satu bangsa yang tidak terpecah-belah oleh partai-partai dan lebih banyak partai lagi, saya tahu bahwa mereka tidak menyokong kelompok-kelompok pemuda yang hanya mengekor saja kepada partai ayah-ayah mereka. ... Gunakanlah kedaulatan pemuda! Jangan hanya membeo kepada partai-partai saja.”<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Dikutip dari, Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI*, (Hasan Basari), Jakarta: LP3ES, 1986, hal. 218.

<sup>16</sup> *Ibid*, Ulf Sundhaussen, 1986 : 221.

<sup>17</sup> *Ibid*, Ulf Sundhaussen, 1986 : 221-222.



Dua hari kemudian Presiden Soekarno kembali mengatakan bahwa partai-partai hanya menjadi sarana bagi kepentingan pribadi para pemimpin politik. Hal senada dikemukakan oleh Bung Hatta, pada bulan Nopember 1958 dia turut mengancam parpol dan sistem yang sedang berlaku:

“partai-partai hanya dijadikan tujuan pada dirinya sendiri, dan negara sebagai alat mereka ... Kedudukan pemerintah telah menjadi kedudukan seorang pesuruh partai politik”.<sup>18</sup>

Menurut Ulf Sundhaussen, kampanye menghantam parpol selama Demokrasi Liberal mencapai puncaknya pada tahun 1958. Tanggal 5 September A.H. Nasution melarang cabang-cabang Masyumi, PSI, IPKI, Parkindo didaerah-daerah bergolak karena menyokong PRRI.<sup>19</sup> Pukulan yang lebih dahsyat terhadap parpol datang dari Dewan Nasional yang sudah memasuki wilayah Majelis Konstituante karena menghadapi jalan buntu mengenai ideologi, terutama mengenai tempat Islam dalam konstitusi yang baru.

Presiden Soekarno pun terus menggalakan dukungan bagi Demokrasi Terpimpin, akan tetapi tidak lagi berbicara untuk mengubur parpol. Menurut Ulf Sundhaussen karena kekuasaan yang dihimpun Tentara selama Keadaan Darurat Perang (*Staat van Oorlog en Beleg*) menjadikan bargaining position Tentara kepada Presiden Soekarno cukup kuat. Membiarkan eksistensi partai-partai politik dalam beberapa hal akan dapat mengimbangi dominasi Tentara. Apalagi partai-partai non Komunis telah kehilangan banyak pengaruhnya di masyarakat. Menurut Sundhaussen, “mereka telah melepaskan sebagian besar dari *raison d’etre* mereka, ketika partai-partai ini berusaha menunda pemilihan nasional yang direncanakan akan dilangsungkan dalam 1959, karena mereka tidak melihat prospek yang cerah dalam suatu pertarungan yang baru dengan PKI.”

Kondisi politik selama Demokrasi Terpimpin menghadirkan segitiga kekuatan antara TNI / AD - Bung Karno - PKI. Segitiga kekuatan ini mengandung pertentangan politik terselubung, terutama bagi kalangan TNI / AD yang anti Komunis. Segitiga kekuatan mengalami kristalisasi ketika bulan Januari 1960 Presiden Soekarno mengeluarkan Perpu No.7/1959 mengenai “persyaratan dan penyederhanaan partai-partai”. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa partai harus secara formal menerima baik UUD 1945, Pancasila, Manipol / USDEK,<sup>20</sup> dan harus mempunyai anggota sekurang-

<sup>18</sup> *Ibid*, Ulf Sundhaussen, 1986 : 222.

<sup>19</sup> *Ibid*, Ulf Sundhaussen, 1986 : 233.

<sup>20</sup> Manipol merupakan singkatan dari Manifesto Politik yaitu pidato politik Bung Karno yang kemudian dijadikan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan urutan inisial USDEK adalah: U = Undang-undang Dasar 1945; S =

kuranya 150.000 orang di 65 distrik, serta tak boleh menerima bantuan luar negeri. Untuk itu Presiden mempunyai wewenang membubarkan setiap partai yang menentang prinsip-prinsip negara, atau yang terlibat dalam - atau tidak mengutuk pemberontakan. Dengan demikian maka tamatlah riwayat Masyumi dan PSI karena hubungan mereka dengan para pimpinan PRRI. Restrukturisasi atas partai-partai pun terus dilakukan oleh pemerintah. Terutama dengan dibekukannya partai Murba karena membentuk BPS (Badan Pendukung Soekarnoisme) sehingga tinggalah PKI sebagai satu-satunya kekuatan partai politik dominan.

Pertentangan prinsipil antara Komunis dengan kelompok agama, khususnya Islam dan Katolik disatu pihak. Dan pertentangan antara Komunis dengan TNI, khususnya AD dilain pihak - membutuhkan suatu payung ideologi yaitu Nasakom. Nasakom merupakan kerangka kerjasama dari tiap kekuatan parpol yang eksis guna menjamin integrasi nasional dengan mengakhiri pertentangan ideologi. Motivasi Nasakom sebagai payung politik bagi integrasi nasional dapat digambarkan sebagai berikut:

“Syukur alhamdulillah, sesudah saya memberi penerangan, bahaya pecahnya Nasakom ini sudah berkurang. Yaitu tatkala saya sudah memberikan penerangan bahwa Nas tidak berarti Ali Sastroamidjojo atau PNI, atau Asmara Hadi atau Partindo. A itu tidak berarti Idham Chalid atau Nahdlatul Ulama, atau Frans Seda atau Partai Katolik, atau Badawi atau Muhammadiyah, atau J. Leimena atau Parkindo. Dan bahwa Kom itu tidak berarti Aidit atau PKI. Nas dan A dan Kom, ketiga-tiganya adalah roman muka realitas daripada revolusi kita ini. Revolusi kita adalah revolusi yang beroman muka Nas, beroman muka A, beroman muka Kom. Nas dan A dan Kom mengenai inti daripada isi revolusi kita. Revolusi kita namakan Revolusi Pancamuka. Revolusi nasional, revolusi politik, revolusi ekonomi, revolusi sosial, revolusi kultur, bahkan revolusi pembangunan manusia baru Indonesia. Revolusi ini tidak bisa lain daripada roman muka Nas dan A dan Kom.”<sup>21</sup>

Begitulah kehidupan parpol selama Demokrasi Terpimpin, sampai pada akhirnya keseimbangan politik antara TNI / AD - Bung Karno - PKI mengalami kegagalan. Maka lahirlah apa yang dikenal dengan Orde Baru.

---

Sosialisme Indonesia; D = Demokrasi Terpimpin; E = Ekonomi Terpimpin; K = Kepribadian Indonesia. Istilah USDEK diperkenalkan oleh Bung Karno, lihat Soe Hok Gie, *Catatan Seorang Demontran*, Jakarta: LP3ES, 1983, Hal. 452.

<sup>21</sup> Budi Setiyono dan Bonnie Triyana (penyunting), “Amanat PJM Soekarno di Hadapan Para Pemimpin dari 7 Partai Politik di Guest House Istana Presiden, Jakarta 27 Oktober 1965”, *Revolusi Belum Selesai, Kumpulan Pidato Presiden Soekarno, 30 September 1965-Pelengkap Nawaksara*, Yogyakarta: Ombak, 2005, hal. 54.

### III.1.4. Era Orde Baru

Gambaran ketidakstabilan politik pada pemerintahan sebelumnya tergambar dari perhitungan yang dilakukan oleh Arbi Sanit, dari sekitar 25 buah Kabinet yang memerintah Indonesia sejak merdeka, hanya 7 Kabinet yang berhasil memerintah selama 12 sampai 23 bulan. Kemudian ada 12 Kabinet yang berumur antara 6 sampai 11 bulan. Dan terdapat 6 buah Kabinet yang mampu bertahan antara 1 sampai 4 bulan. Jatuh - banggunnya Kabinet dalam tempo singkat membuktikan bahwa kesempatan yang tersedia bagi setiap pemerintahan (kabinet) untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi sangat tidak mungkin. Rapuhnya kestabilan politik diikuti pula oleh kekerasan politik antara tahun 1948-1967. Ada sekitar 45 buah protes melalui demonstrasi, 83 huru-hara (riot) dan 615.000 kematian.<sup>22</sup>

Kalaupun perkembangan partai terjadi dengan pesat pada tahun 1950an, dimana pembentukan lembaga-lembaga politik seperti Front Nasional, KOTI (Komando Operasi Tertinggi), dan lain-lain dalam tahun 1960an dapat memberi ruang bagi partisipasi politik dan pengerahan massa secara politik. Akan tetapi keadaan ekonomi secara keseluruhan semakin merosot. Cadangan devisa merosot dari US \$ 259.900.000- dalam tahun 1959 menjadi US \$ 8.600.000- dalam tahun 1963; pada tahun 1966 utang luar negeri terhitung US \$ 2.447.000.000-. Defisit anggaran belanja negara meningkat dari Rp. 3.602.000.000- dalam tahun 1955 menjadi 2.256.000.000.000- dalam tahun 1965, dimana inflasi naik dengan cepat dari 109% antara Desember 1962 sampai Desember 1963 menjadi 1320% pada bulan Juni 1965 dan Juni 1966.<sup>23</sup>

Kondisi tersebut menjadi titik tolak Orde Baru untuk melakukan restrukturisasi dalam kehidupan politik nasional. Orde Baru bertekad untuk melakukan restrukturisasi dibidang politik dengan melaksanakan ketetapan MPRS No. XXII Tahun 1966 tentang Pembaharuan Sistem Politik, dan penyederhanaan jumlah partai yang ada. Namun usaha penyederhanaan partai tidak berjalan dengan mudah karena harus melalui jalan yang panjang dan perlu menciptakan jalur-jalur pengaman konstitusional. Penggunaan jalur konstitusi dalam mewujudkan stabilitas nasional sangat terkait dengan strategi dasar Orde Baru untuk melaksanakan "UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen."

<sup>22</sup> Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia, Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, Hal. 1.

<sup>23</sup> *Ibid*, Arbi Sanit 2003 : 2.

Orde Baru melakukan penataan kepartaian dengan terlebih dahulu merehabilitasi partai Murba dan mendirikan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) sebagai wadah peleburan dari ormas-ormas Islam. Sekaligus pemerintah menolak tuntutan Masyumi untuk direhabilitasi. Sedangkan landasan konstitusional bagi penataan kepartaian dilakukan melalui TAP MPRS XII/MPRS/1966 tentang kepartaian. Ada 3 inti dari ketetapan ini: *Pertama*, pemerintah bersama DPR-GR akan segera membentuk UU yang mengatur kepartaian, keormasan, dan kekaryaannya menuju kepada penyederhanaan parpol; *Kedua*, penyederhanaan parpol dilakukan melalui fusi, dari 10 parpol menjadi 2 parpol dan 1 golongan karya. Proses fusi pun dilakukan oleh pemerintah sehingga terkesan dipaksakan; *Ketiga*, mengisolasi parpol dengan konstituennya. Isolasi itu dilakukan melalui konsep massa mengambang dimana kepengurusan parpol tidak diperkenankan sampai ketingkat kecamatan / desa.<sup>24</sup>

Sesuai dengan tekad pemerintah Orde Baru untuk melaksanakan pembangunan disegala bidang, termasuk melakukan pembaharuan sistem politik, dan mengadakan penyederhanaan jumlah partai sebelum dilakukan pemilihan umum (pemilu). Pada mulanya pemilu direncanakan akan diselenggarakan tahun 1969 namun dengan beberapa pertimbangan teknis dan strategis Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum baru selesai - dibicarakan oleh DPR pada 22 Nopember 1969. Oleh karena itu pemilu ditunda hampir dua tahun - baru dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1971. Hasil akhir perolehan kursi di DPR pada pemilu 1971 adalah sebagai berikut: 231 kursi untuk Golongan Karya (Golkar); Nahdlatul Ulama (NU) dengan 56 kursi; Parmusi memperoleh 29 kursi; PNI meraup 20 kursi; Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) mendapatkan 10 kursi; Parkindo meraih 7 kursi; Partai Katolik memperoleh 3 kursi; dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) 2 kursi. Adapun partai IPKI dan partai Murba tidak memperoleh 1 kursi pun dari 360 kursi yang diperebutkan.<sup>25</sup>

Angka perolehan kursi pada pemilu 1971 menunjukkan bahwa satu sistem partai dominan telah lahir dalam sistem politik Indonesia. Dengan demikian maka pemerintah yang didukung oleh Golkar dan ABRI akan dapat berbuat apapun yang dikehendaki tanpa harus menghiraukan suara parpol lain. Sehingga pemilu 1971 telah melempangkan jalan

<sup>24</sup> Etin Nurhaetin Ningrum, *Analisis Pemurnan Suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pemilu Legislatif 2004 di Provinsi DKI Jakarta*, Tesis Magister, Jakarta: FISIP Universitas Indonesia, 2005, hal. 33-34.

<sup>25</sup> Umaidi Radi, *Strategi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Semasa 1973-1982: Suatu Studi Tentang Kekuatan Politik Islam Tingkat Nasional*, Jakarta : Integrita Press, 1984, hal. 72-75.

bagi pemerintah untuk segera mewujudkan gagasan pembaharuan sistem politik dan penyederhanaan jumlah partai guna mewujudkan stabilitas politik.

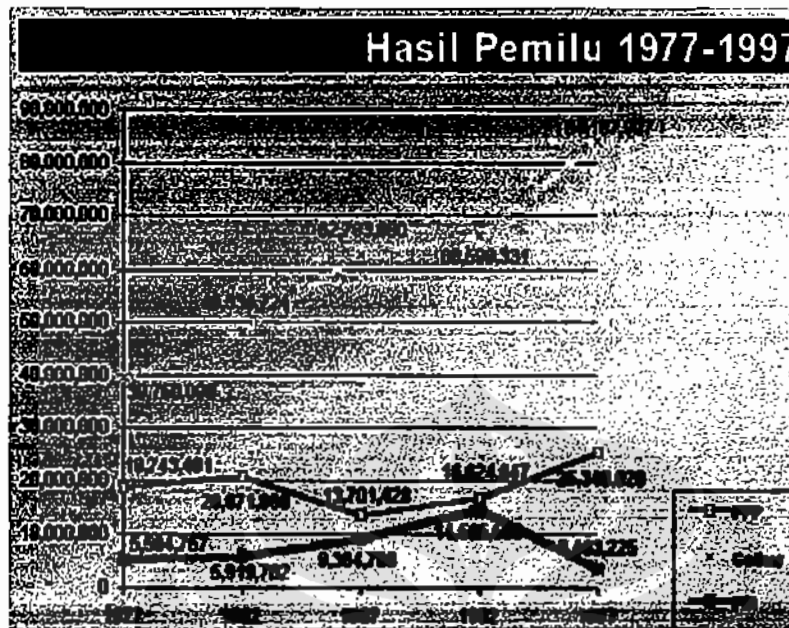
Langkah pertama yang diambil pemerintah adalah mengadakan pengelompokan partai-partai menjadi tiga kelompok yaitu: Kelompok spiritual-material adalah kelompok yang menitik beratkan pada program-program pembangunan spiritual tanpa mengabaikan pembangunan material; Kemudian kelompok material-spiritual ialah kelompok yang menitik beratkan pada program-program pembangunan material tetapi tidak mengabaikan pembangunan spiritual; sedangkan kelompok ketiga adalah kelompok karya. Anjuran Presiden Soeharto untuk melakukan penyederhanaan parpol pada dasarnya diterima oleh semua partai politik yang ada, kecuali partai Katolik dan Parkindo. Kedua parpol itu tidak bersedia mengelompokkan diri pada kelompok spiritual-material tetapi lebih memilih bergabung dengan kelompok nasionalis (material-spiritual).

Langkah strategis Orde Baru selanjutnya adalah menggunakan lembaga legislatif hasil pemilu 1971 untuk melakukan restrukturisasi kehidupan sistem politik. DPR hasil pemilu 1971 kemudian menyusun Rancangan Undang-undang Kepartaian, dimana pemerintah mempersiapkan konsep-konsepnya untuk kemudian disodorkan kepada DPR. Dalam rancangan tersebut pemerintah hanya mengakui 3 organisasi politik, sehingga pemilu 1977 hanya diikuti oleh dua parpol dan satu Golongan Karya. Konsep ini dibahas dan disetujui oleh DPR untuk menjadi undang-undang. Didalam UU No. 3/1975 tentang Parpol dan Golkar disebutkan, "Dengan adanya tiga organisasi kekuatan sosial politik tersebut, diharapkan agar partai-partai politik dan Golkar benar-benar dapat menjamin terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa, stabilitas nasional serta terlaksananya percepatan proses pembangunan." Menyadari posisinya yang makin terjepit, parpol tidak mempunyai pilihan lain - selain menjadi "etalase demokrasi" bagi eksekutif. Untuk memberikan gambaran tentang perolehan suara dari kedua parpol dan Golkar pasca terjadinya fusi, dimana Golkar menjadi partai dominan. Lihat Grafik III.1.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Sumber : Dudung AM, "Kampanye dari Masa ke Masa (2) : Intimidasi, Politik Buldozer, dan Monoloyalitas", <http://www.suaramerdeka.com/harian/0403/14/nas6.htm>

Grafik III.1. Perolehan Suara Pada Pemilu 1977-1997



Partai yang dibangun dari fusi partai-partai dimana secara ideologi berbeda, jelas rawan konflik. Jadi tidak heran apabila parpol dimasa Orde Baru tak pernah lepas dari konflik yang kebanyakan memerlukan intervensi pemerintah. Kalaupun penetrasi pemerintah dalam menghegemoni eksistensi parpol tidak bisa dinafikan. Dalam kondisi yang demikian parpol tidak berdaya menghadapi hegemoni pemerintah disatu sisi dan makin kehilangan perannya disisi lain.

Selain melakukan penciptaan pada kontestan pemilu, pemerintah juga membuat penyeragaman asas. Penyeragaman asas dilakukan dalam rangka penyederhanaan pluralisme ideologi orpol dan ormas. Menurut Presiden Soeharto,

Pembaharuan dan penyederhanaan kehidupan politik menyangkut dua segi sekaligus ialah pembaharuan wadah maupun isinya. Dengan kata lain: menyangkut penyederhanaan struktur dan pembaharuan semangat, sikap serta gerak kekuatan sosial politik kita. ... sistem multi - partai ternyata gagal untuk membina stabilitas politik, untuk membangun pemerintahan yang efektif, dan karena itu gagal mengantarkan bangsa ini pada kiprahnya, pembangunan. ... Padahal kita semua sadar dan sepakat bahwa Pemilihan Umum adalah bagian dari pembangunan politik dalam rangka pembangunan besar bangsa kita. ... Pembangunan itu kita lihat sebagai Pengamalan Pancasila. Dalam jangka panjang maka kelestarian Pancasila akan terjamin apabila semua golongan dan lapisan bangsa kita telah terbiasa untuk mengamalkan Pancasila melalui perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan bersamaan dengan itu kita laksanakan pembangunan yang berencana dalam rangka mewujudkan masyarakat Pancasila. ... Sebagai bagian dari kekuatan bangsa, kekuatan-kekuatan sosial politik pun harus merupakan kekuatan pembangunan. Karena itu kekuatan-kekuatan sosial

politik harus membawa aspirasi dan harus menjadi perancang pembangunan yang berdasarkan Pancasila tadi.<sup>27</sup>

Asas tunggal membawa implikasi bagi eksistensi partai-partai, terutama partai berbasis primordial. Disamping kehilangan jati diri, partai juga kehilangan ciri khas sehingga terputus secara emosional dari grassroot. Terutama pasca terbitnya UU No. 3/1985 tentang parpol dan Golkar, dimana parpol diharuskan mengubah lambang / tanda gambar untuk pemilu. UU ini mengharuskan agar semua partai berasaskan Pancasila. Menurut Arbi Sanit,<sup>28</sup> Orde Baru menggunakan pendekatan “kestabilan politik dapat pula dipelihara dengan mempertahankan tingkat pelembagaan politik yang rendah; asal saja diimbangi oleh partisipasi politik yang rendah pula.” Inilah yang kemudian menjadi latar belakang kehidupan parpol selama Orde Baru atau kita kenal “Demokrasi Pancasila”.

Ditengah depolitisasi dan deideologisasi terhadap kekuatan parpol itulah berbagai kelompok politik mencari tempat aktualisasinya. Pada awal dekade 1980an gerakan keislaman mengambil Musholla dan Masjid sebagai basis operasional dan strukturnya. Gerakan tersebut mulai berkembang dari tahun ke tahun. Gerakan yang mereka namakan sebagai Gerakan Dakwah ini makin mewarnai suasana keislaman dikampus-kampus dan masyarakat umum dimana ukhuwah atau persaudaraan diantara mereka menjadi alternatif cara hidup ditengah-tengah masyarakat yang individualistik. Komitmen atas nilai-nilai Islam sedikit demi sedikit mengusir perilaku materialistik yang makin mewabah dimasyarakat.

Pada saat gerakan dakwah ini semakin membesar, mereka pun memperluas kiprahnya dengan mengisi ranah-ranah sosial kemasyarakatan. Ruh keislaman pun ditanamkan melalui berbagai media seperti seminar, tabligh, aktivitas sosial, ekonomi dan juga pendidikan. Berbagai yayasan pendidikan Islam pun mereka dirikan sebagai sarana gerakan. Sedangkan dalam bidang politik mereka melakukan transformasi kesadaran bagi masyarakat Muslim dengan segmentasi Pemuda dan Mahasiswa.

### III.1.5. Era Reformasi

Gelombang aksi unjuk rasa dengan agenda tunggal - menurunkan Presiden Soeharto membuahkan hasil pada 21 Mei 1998. Babak baru sejarah perjalanan bangsa Indonesia pun dimulai. Lengsernya Soeharto dari singgasana kekuasaan menyebabkan

<sup>27</sup> Presiden Soeharto, *Pidato Kenegaraan*, tanggal 16 Agustus 1982 di Jakarta.

<sup>28</sup> *Loc.Cit.*, Arbi Sanit.



Orde Baru secara formal tumbang. Akibatnya, sistem pun berganti dengan suatu sistem baru bertajuk reformasi. Kebebasan berekspresi dan menyampaikan aspirasi dalam koridor demokrasi kembali menemukan ruang. Suatu era transisi demokrasi pun dimulai bersamaan dengan lengsernya pemerintahan Orde Baru yang menancapkan kekuasaan selama 32 tahun. Kejatuhan rezim Orde Baru pada konteks politik merupakan titik awal lahirnya transisi demokrasi. Transisi demokrasi adalah interval waktu antara satu rezim politik dengan rezim politik lainnya.<sup>29</sup> Jadi era reformasi merupakan transisi demokrasi. Wajar apabila proses politik di era reformasi diharapkan bisa memastikan berjalannya prinsip - prinsip demokrasi.

Mundurnya Soeharto sebagai Presiden RI kemudian digantikan oleh BJ Habibie yang pada waktu itu menjabat wakil Presiden. Salah satu beban agenda pemerintahan Habibie adalah melaksanakan pemilu. Penyelenggaraan pemilu 1999 dengan sendirinya mengafirmasi hasil-hasil pemilu 1997, termasuk status keanggotaan parlemen (DPR / MPR) sampai dengan suksesi kepemimpinan nasional. Sebelum penyelenggaraan pemilu, pemerintah mengajukan rancangan undang-undang yang mengatur tentang parpol, rancangan undang-undang tentang pemilu, serta susunan dan kedudukan (susduk) MPR, DPR dan DPRD. Sejarah berulang, peristiwa yang pernah terjadi pada pemilu 1955 kembali dialami, setidaknya, kemunculan banyak partai menandakan hal itu. Reformasi menjadikan orang begitu bersemangat untuk mendirikan parpol dengan berbagai motivasi, mulai dari sekedar menguji keberuntungan, romantisme kejayaan masa lalu, sampai pada agenda politik yang lebih idealis. Ratusan parpol bermunculan. Drama politik pun dimulai ketika UU No. 2/1999 tentang Partai Politik disahkan. Departemen Kehakiman dan HAM mencatat ada 141 parpol mendaftarkan diri sebagai kontestan pemilu. Membludaknya jumlah parpol berkorelasi dengan syarat yang relatif mudah untuk mendirikan parpol.<sup>30</sup>

Pemilu akhirnya dilaksanakan dengan 48 parpol sebagai kontestan. Walaupun pemilu disiapkan dalam waktu yang relatif singkat, yakni 13 bulan. Namun dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, yaitu pada 17 Juni 1999. Adanya kekhawatiran bahwa situasi bisa kurang kondusif tidak terbukti. Pemilu berjalan lancar - lancar saja. Memang sempat terjadi penolakan dari 27 parpol untuk menandatangani berita acara.

<sup>29</sup> O' Donnel dan Philippe C. Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*, Jakarta: LP3ES, 1993, hlm. 6

<sup>30</sup> *Ibid*, Koirudin, 2004 : 21.

Sikap menolak ditunjukkan dalam sebuah rapat pleno yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dokumen dari KPU itu kemudian diserahkan kepada Presiden, untuk selanjutnya diserahkan kepada Panwaslu oleh Presiden. Panwaslu diberi tanggungjawab untuk memeriksa keberatan yang diajukan oleh 27 parpol. Karena keberatan tidak disertai dengan bukti-bukti lapangan yang valid maka pemilihan umum dinyatakan sah.

Pemilu 1999 memunculkan 5 parpol besar dengan perolehan suara sebagai berikut: PDIP meraih 35.689.073 suara (33,7%, sehingga memperoleh 153 kursi); Partai Golkar meraih 23.741.749 suara (22,44%, dan memperoleh 120 kursi); PKB memperoleh 13.336.982 suara (12,61% namun menempatkan 51 kursi); PPP (Partai Persatuan Pembangunan) memperoleh 11.329.905 (10,71%, akan tetapi memperoleh 58 kursi); Sedangkan PAN memperoleh 7.528.956 suara (7,12% dan meraih 34 kursi); Perolehan suara secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel III.1.<sup>31</sup>

**Tabel III.1. Perolehan Suara Dari Partai-partai Politik Diera Reformasi**

PEROLEHAN SUARA PEMILU LEGISLATIF 1999				PEROLEHAN SUARA PEMILU LEGISLATIF 2004			
No	Partai Politik	Perolehan Suara	%	No	Partai Politik	Perolehan Suara	%
1	PDIP Perjuangan	35.689.073	33,74	1	Golkar	24.480.757	21,58
2	Golkar	23.741.749	22,44	2	PDIP Perjuangan	21.028.829	18,63
3	PPP	11.329.905	10,71	3	PKB	11.989.564	10,57
4	PKB	13.329.982	12,61	4	PPP	9.248.764	8,15
5	PAN	7.528.956	7,12	5	Demokrat	8.455.225	7,45
5	PBB	2.049.708	1,94	6	PK Sejahtera	8.325.020	7,34
7	Partai Keadilan	1.438.555	1,36	7	PAN	7.303.324	6,44
8	PKP	1.065.686	1,01	8	PBB	2.970.487	3,62
9	PNU	679.179	0,64	9	PBR	2.764.998	2,44
10	PDKB	550.846	0,52	10	PDS	2.414.254	2,13
11	PBI	364.291	0,34	11	PKBP	2.399.290	2,11
12	PDI	34.572	0,03	12	PKPI	1.424.240	1,26
13	PP	655.052	0,62	13	PKP	1.313.654	1,16
14	PDR	427.854	0,40	14	PNBK	1.230.455	1,08
15	PSII	37.592	0,04	15	Pancasila	1.073.139	0,95
16	PNI Front Marhaenis	365.176	0,35	16	PNI	923.159	0,81
17	PNI Massa Marhaen	345.629	0,33	17	PNUI	895.610	0,79
18	IPKI	328.654	0,31	18	Pelopop	873.932	0,77
19	PKU	300.064	0,28	19	PPDI	855.811	0,75
20	Masyumi	458.718	0,43	20	Merdeka	842.541	0,74
21	PKD	218.675	0,20	21	PSI	679.296	0,60
22	PNI Supeni	377.137	0,36	22	PIB	672.952	0,59
23	KRISNA	369.719	0,35	23	PPD	657.916	0,58
24	Partai KAMI	289.489	0,27	24	PBSD	636.397	0,56
25	PUI	269.309	0,25		<b>JUMLAH SUARA</b>	<b>113.462.414</b>	<b>100</b>
26	PAY	213.979	0,20				
27	Partai Republik	328.564	0,31				
28	Partai MKGR	204.204	0,19				
29	PIB	192.712	0,18				
30	Partai SUNI	180.167	0,17				
31	PCD	168.087	0,16				
32	PSII 1905	15.282	0,01				
33	Masyumi Baru	152.589	0,14				
34	PNBI	149.136	0,14				
35	PUDI	14.098	0,01				
36	PBN	14.098	0,01				

<sup>31</sup> Sumber : Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 1999 dan 2004, Jakarta.

37	PKM	104.385	0,10
38	PND	96.984	0,09
39	PADI	85.838	0,08
40	PRD	7.873	0,01
41	PPI	63.934	0,06
42	PID	62.901	0,06
43	Murba	62.006	0,06
44	SPSI	61.105	0,06
45	PUMI	49.839	0,05
46	PSP	49.807	0,05
47	PARI	5.547	0,01
48	PILAR	40.517	0,04
JUMLAH SUARA		105.786.661	100

Tabel diatas menunjukkan dua permasalahan penting: *Pertama*, perolehan parpol dengan nafas Islam berkisar antara 35-38% suara pemilih selama dua kali pemilu. Pada pemilu 1999 partai-partai Islam mendapat dukungan sekitar 35,23% dari 105.786.661 pemilih, jumlah ini meningkat pada tahun 2004 menjadi 38, 56% dari 113.462.414 suara pemilih atau mengalami lonjakan sekitar 3% suara. *Kedua*, perolehan suara partai primordial non Islam juga mengalami peningkatan, hal ini direpresentasikan oleh PDKB (Partai Demokrasi Kasih Bangsa) yang meraih 550.846 pemilih atau 0,52% suara. Jumlah ini mengalami peningkatan pada pemilu 2004 menjadi 2.424.254 pemilih atau sekitar 2,13% suara pemilih melalui PDS (Partai Damai Sejahtera). Memang kedua partai tidak memiliki jalinan historis – organisasi tetapi dalam hal ini, baik PDKB maupun PDS merepresetasikan pemilih Kristen / Katolik.

Parpol dengan nafas Islam sebenarnya memperoleh kursi lebih besar di parlemen tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Hal ini disebabkan oleh sistem pemilu yang berlaku ketika itu. Perbedaan jumlah perolehan suara dengan jumlah kursi dari setiap partai di DPR akibat sistem pembagian kursi, dimana pembagian kursi dilakukan tanpa *stembus accord*, sehingga sisa suara tidak terpakai. Akibatnya, PKB yang memperoleh suara lebih besar daripada PPP namun memperoleh kursi lebih sedikit di DPR.

Babak kedua adalah suksesi kepemimpinan nasional, melalui koalisi yang digalang oleh Amin Rais dengan gerakan poros tengah, KH Abdurrahman Wahid (Gusdur) dari PKB menjadi Presiden RI ke-empat mengungguli Megawati. Akibatnya, stabilitas politik pun sulit diwujudkan di era pemerintahan Abdurrahman Wahid. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, disamping kebijakan sang Presiden yang sering mengundang kontroversi, dukungan parlemen yang tidak begitu dominan mengakibatkan koalisi mudah retak. Gusdur kemudian digantikan oleh Megawati yang ketika itu menjabat sebagai Wakil Presiden. Megawati sempat gagal untuk menjadi Presiden pada

sidang umum MPR tahun 1999 akibat isu gender. Persoalan gender ini dikait - kaitkan dengan konteks kepemimpinan perempuan dalam agama Islam.

Menjelang pemilu 2004, partai-partai mulai berfikir untuk menghadapi pemilu berikutnya. Suatu kondisi paradoks pun dialami oleh parpol ketika soliditas internal tidak mampu diwujudkan. Bahkan hampir semua partai besar mengalami konflik internal. PDI Perjuangan pasca Kongres Semarang ditinggalkan oleh Eros Djarot dan Dimiyati Hartono, kedua tokoh ini kemudian mendirikan PNBK dan PITA. Begitu pula dengan partai Golkar, konflik internal menimpa ketika Akbar Tanjung didakwa dan lantas menjadi tersangka kasus penyalahgunaan dana non bugeter Bulog. Suara sumbang yang mendesak Akbar Tanjung mundur, keluar dari internal DPP seperti Marwah Daud Ibrahim. Begitu juga dengan PPP pimpinan Wapres, Hamzah Haz. Karena tidak puas dengan kebijakan partai, K.H. Zainuddin MZ dan para pendukungnya keluar - mendirikan PPP Reformasi yang kemudian berganti nama menjadi Partai Bintang Reformasi (PBR). Begitu juga dengan PKB, pasca pelaksanaan Sidang Istimewa, Matori Abduljalil sebagai ketua umum dewan tanfidz dipecat karena dinilai melanggar keputusan DPP PKB. Posisi Matori Abduljalil kemudian digantikan oleh Alwi Sihab. Konflik PKB pun berakhir di pengadilan, dimana PKB Alwi Sihab dinyatakan sebagai pemenang. Tidak berbeda dengan PKB, PAN mengalami hal serupa, konflik terjadi pasca Kongres di Yogyakarta. Pengurus pusat "non Muhammadiyah" yang dimotori oleh Faisal Basri meninggalkan PAN pada pertengahan Februari 2001. Demikian halnya dengan partai - partai lain, seperti Partai Bulan Bintang (PBB).<sup>32</sup>

Perselisihan demi perselisihan internal parpol di era reformasi terus berlangsung. Walaupun hal itu sah-sah saja dalam iklim demokrasi, namun perjalanan bangsa menjadi makin kurang kondusif. Sebab menurut fungsinya, parpol harus mendidik masyarakat untuk sadar politik dalam rangka memperjuangkan hak-haknya melalui parpol sehingga dapat tercipta suatu stabilitas politik. Akan tetapi pada kenyataannya, parpol hanya menjadi kendaraan politik untuk menghantarkan elit partai menuju kursi kekuasaan dan setelah memperoleh kekuasaan - aspirasi konstituen jarang diperjuangkan. Akibatnya, pertentangan yang terjadi di elit politik seringkali tidak berkorelasi dengan permasalahan yang dialami masyarakat. Namun begitu, reformasi bukan berarti tanpa kemajuan signifikan. Kemajuan yang patut digarisbawahi dari era reformasi adalah, munculnya

---

<sup>32</sup> *Ibid*, Koindin, 2004 : 56-59.

kesadaran untuk menciptakan stabilitas politik dengan jalan - cara demokrasi. Upaya ini terlihat dari dua hal: *Pertama*, pengurangan jumlah partai didasarkan pada dukungan dimasyarakat; *Kedua*, mulai ada kesadaran untuk membentuk partai pemerintah disatu sisi dan partai oposisi disisi lain, walaupun masih jauh dari ideal.

## III.2. Gambaran Umum Obyek Penelitian

### III.2.1. PDI (Perjuangan) di Panggung Sejarah Politik Indonesia.

Perubahan sistem politik pada masa awal Orde Baru membawa konsekuensi - konsekuensi serius bagi kehidupan parpol. Ditambah dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 1969 tentang Kewajiban Para Anggota Departemen. Dengan demikian Pegawai Negeri hanya boleh memberikan loyalitasnya kepada bangsa dan negara. Permendagri secara langsung memukul PNI yang sejak jaman Presiden Soekarno memiliki basis dukungan dari pegawai negeri / pamong praja.

Perubahan sistem politik kepartaian selama Orde Baru dilalui dengan proses fusi. Inisiatif mengenai fusi datang dari Presiden Soeharto. Realisasi atas inisiatif tersebut diwujudkan melalui rangkaian konsultasi antara Presiden dengan tokoh-tokoh partai. Konsultasi pertama dilakukan pada tanggal 7 Januari 1970 dengan tokoh-tokoh dari 9 parpol. Dalam kesempatan itu Presiden melontarkan gagasan pengelompokan parpol menjadi dua kelompok, dengan menekankan pada aspek materiil dan spirituil. Sebagai tindak lanjut dilakukan pertemuan secara lebih khusus pada tanggal 27 Februari 1970 dengan 5 parpol yang dikelompokkan kedalam materiil-spirituil. Presiden kembali menegaskan pokok-pokok pikiran pada pertemuan pertama dan membentuk "up konfederasi" - yaitu pembentukan dewan ketua-ketua umum parpol yang dibantu oleh sebuah badan perkerja sebagai *brain trust*.<sup>33</sup> Kemudian ke-5 parpol membentuk kelompok demokrasi pembagunan pada tanggal 9 Maret 1970.

Terbentuknya fraksi tidak secara otomatis membawa kelima partai ke arah fusi. Sebab masih terdapat perbedaan diantara partai-partai politik tersebut. Jika PNI mengusulkan mekanisme pemilu sebagai cara untuk mengurangi jumlah parpol. Maka parpol kecil menolak gagasan ini karena eksistensi mereka bisa berakhir. Parkindo dan Partai Katolik merencanakan melakukan "kerjasama" untuk menggabungkan struktur partai mereka dengan membentuk "Partai Kristen Demokrat". Gagasan kerjasama ini

<sup>33</sup> *Op.Cit.*, Etn Nurhaetin Ningrum, 2005 : 35.

Peranan partai politik..., Achmad Suhawi, Pascasarjana-UI, 2008

diprakarsai oleh I.J. Kasimo dan Da Costa sebagai langkah awal untuk melakukan fusi dengan partai lain, akan tetapi tidak pernah terealisasi.<sup>34</sup> Dalam perkembangannya mereka tidak bergabung dengan kelompok spirituil-materiil melainkan materiil-spirituil. Pertemuan secara intensif dari kelima pimpinan parpol kemudian memunculkan usulan nama terhadap parpol hasil fusi, yaitu Partai Demokrasi Pancasila, Partai Demokrasi Pembangunan, dan Partai Demokrasi Indonesia. Dari ketiga alternatif tersebut kemudian dicapai kesepakatan untuk menggunakan nama "Partai Demokrasi Indonesia".

Deklarasi pun dilakukan pada tanggal 10 Januari 1973 tepat pada pukul 24.00. Para deklarator fusi adalah wakil dari masing-masing parpol. Mereka adalah Mh. Isnaeni dan Abdul Madjid (PNI); A. Wenas dan Sabam Sirait (Parkindo); Ben Mang Reng Say dan F.S. Wignjosumarsono (Partai Katolik); S. Murbantoko dan John Pakan (Partai Murba), serta Achmad Sukarmadidjaja dan Mh. Sadrie (Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia / IPKI). Hasil fusi disebarluaskan melalui konferensi press pada 11 Januari 1973 oleh Ben Mang Reng Say dengan Isnaeni, Wenas, Sukarmadidjaja, Murbantoko. Kemudian pada tanggal 13 Januari 1973 dibentuk Majelis Pimpinan Pusat (MPP) yang diwakili oleh masing-masing unsur sebanyak 5 orang. Ketua Umum diberikan kepada PNI (Mh. Isnaeni) dan Koordinator Sekjen diserahkan kepada Parkindo (Sabam Sirait). Sedangkan A. Sukarmadidjaja, Ben Mang Reng Say, A. Wenas, Sugiarto Murbantoko, Soenawar Soekowati menjadi ketua-ketua. Adapun personalia Sekjen terdiri dari W. A. Chalik, F.S. Wignjosumarsono, John Pakan, Abdul Madjid. Susunan pengurus DPP juga dilengkapi dengan lima departemen yang terdiri dari: departemen Politik, departemen Ekubang / Kesra, departemen Penerangan, departemen Kader / Pembinaan Massa, dan departemen Organisasi. Setiap departemen terdiri dari satu orang ketua departemen dan satu orang wakil ketua departemen.

Pengurus kemudian menghadap Presiden pada tanggal 17 Januari 1973 untuk melaporkan perkembangan terakhir. Selanjutnya DPP membentuk 8 tim guna melakukan konsolidasi kedaerah-daerah. Meskipun mereka berhasil menyelesaikan pembentukan 26 DPD pada tanggal 11 Juli 1973, namun banyak mengalami kesulitan untuk membentuk DPC. Bahkan sampai tahun 1976 baru terbentuk 257 cabang diseluruh Indonesia. Pada

---

<sup>34</sup> Comelis Lay, "Modul Kursus Kader Partai Khusus Perempuan II", Badiklatpus DPP PDIP, Jakarta : DPP PDIP, 2003, hal 9; menurut Arif Zulkifli, Parkindo dan Partai Katolik menolak pengelompokan hanya menjadi 2 – mereka lebih senang jika dimasukkan kedalam golongan nasionalis. Karena nasionalis dinilai dapat melaksanakan program tanpa motif-motif ideologis, Arif Zulkifli, *PDIP Di Mata Golongan Menengah Indonesia*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1996, hal. 57.

tahun 1973 berhasil membentuk 154 cabang, tahun 1974 terbentuk 77 cabang, pada 1975 terbentuk 20 cabang, dan tahun 1976 hanya terbentuk 6 cabang.<sup>35</sup> Hal ini membuktikan bahwa posisi parpol menjadi begitu tergantung kepada pemerintah dan tidak mengakar kepada rakyat banyak. Sekaligus menunjukkan bahwa fusi membuat parpol sulit menjelaskan esensi kehadirannya kepada rakyat. Fusi bagi PDI membawa dua konsekuensi: *pertama*, timbulnya konflik intern yang berkepanjangan; *kedua*, hilangnya identitas PDI sebagai partai yang bersatu akibat dari perbedaan latar belakang dari partai - partai yang melakukan fusi.<sup>36</sup>

Disamping membentuk tim konsolidasi, DPP juga membentuk tim konstitusi yang dikenal dengan sebutan "Tim Sepuluh". Tim bertugas menyusun piagam perjuangan partai; AD/ART; serta program perjuangan partai. Tim diketuai oleh Sudjarwo dari PNI karena Soenawar Soekowati sebagai ketua diangkat menjadi Duta Besar di Vietnam. Hasil kerja dari tim sepuluh kemudian diserahkan ke MPP untuk ditindak lanjuti. Rapat MPP pada tanggal 5 Maret 1973 mencapai dua kesepakatan: *pertama*, menyelesaikan piagam perjuangan dan untuk selanjutnya akan diserahkan kepada DPP; *kedua*, setelah DPD Provinsi dan DPD Kabupaten / Kota terbentuk diseluruh Indonesia maka akan diadakan suatu pertemuan secara luas - bersifat nasional sebagai forum prosedural untuk memantapkan fusi. AD / ART sementara dapat diselesaikan dalam rapat antara DPP PDI bersama dengan tim sepuluh pada 8-10 Juni 1973 di Cibogo. Sedangkan piagam perjuangan dan program perjuangan baru bisa dikukuhkan pada rapat MPP pada tanggal 19-20 September 1973.

Kemajuan yang dicapai oleh PDI pada tingkat formal dan kelengkapan aturan organisasi tidak secara otomatis membawa kearah fusi yang menyeluruh – tuntas. Akibat konflik internal yang mulai merebak. Perseteruan dipicu oleh persaingan antar tokoh partai yang satu dengan partai lainnya, egoisme antar unsur, campur tangan pemerintah. Hal itu menyebabkan PDI terjebak pada konflik berkepanjangan. Dimana PDI penuh gejolak yang tak kunjung surut sejak dideklarasikan pada 10 Januari 1973. Konflik intern PDI menurut M. Aswan, karena PDI dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain masalah organisasi, sosialisasi politik, dan pembagian kursi / jabatan.<sup>37</sup> Konsolidasi organisasi menjadi lebih sulit lagi karena dari kelima partai yang berfusi secara ideologi

<sup>35</sup> *Op.Cit.*, Etin Nurhaetin Ningrum, 2005 : 37.

<sup>36</sup> Arif Zulkifli, *PDI Di Mata Golongan Menengah Indonesia*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1996, hal. 58-59.

<sup>37</sup> M. Aswan, *Kehidupan Politik Dalam Organisasi Politik dan Pengaruhnya Terhadap Kesadaran Kehidupan Politik Bangsa*, Tesis Magister Sain, Jakarta: Universitas Indonesia, 1995.



berbeda-beda. PNI berideologi sosio nasionalis dan sosio demokrasi (Marhaenisme), Parkindo berideologi Kristen, Partai Katolik Indonesia berideologi Pancasila dan bertindak menurut asas-asas Katolik, Partai Murba berasaskan sosialisme, sedangkan IPKI berpaham nasionalisme.

Cornelis Lay mengidentifikasi sumber-sumber konflik di PDI secara umum sebagai berikut:<sup>38</sup> *pertama*, perbedaan latar belakang, besaran, basis sosial, dan orientasi ideologi antara 5 parpol; *kedua*, perbedaan motif dan metode untuk fusi; *ketiga*, rivalitas dan rasa saling curiga yang kuat diantara parpol; *keempat*, rivalitas antara elit lintas parpol dan antar elit dalam satu parpol; *kelima*, terjadi penyempitan struktur dari kelima parpol sehingga meningkatkan dinamika persaingan untuk menduduki jabatan yang semakin terbatas; *keenam*, ambisi rezim untuk menundukkan – mengerdilkan parpol. Ditambah lagi dengan hasrat rezim untuk mengeliminasi peran politik tokoh-tokoh yang dianggap “garis keras” atau tidak patuh pada rezim Orde Baru. Sehingga mendorong pemerintah untuk melakukan tekanan, manipulasi, dan intervensi. Menurut Zulkifli, konflik intern PDI disebabkan oleh persaingan antara individu dan *vested interest* antar individu. Kepentingan pribadi banyak mewarnai konflik dalam PDI, terutama bagi mereka yang berasal dari PNI.

Pasca fusi, PDI mengadakan pertemuan nasional sebagai upaya pematangan partai. Pertemuan diberi nama “Konsultasi dan Penataran Nasional” disingkat Konfernas. Pertemuan sekaligus digunakan sebagai prosedur untuk menciptakan prakondisi yang sebaik-baiknya menjelang Kongres I PDI. Namun pertemuan bukan memperoleh hasil - hasil yang mengembirakan, pasca pertemuan PDI justru mulai ditimpa perpecahan - konflik internal secara luas karena melibatkan semua unsur. Figur-figur utama yang terlibat konflik adalah Mh. Isnaeni dan Soenawar Soekowati.

Kepemimpinan PDI diambil alih oleh Soenawar Soekowati dan Usep Ranuwidjaja pada tahun 1975. Melalui tekanan massa, kemudian ditunjuk Sanusi Hardjadinata dan Usep Ranuwidjaja menjadi pimpinan partai. Mereka membawa tugas yang dikenal dengan misi “*damai dan serasi*” untuk melaksanakan Kongres I. Kedua tokoh ini memperoleh dukungan secara luas. Rencana penyelenggaraan Kongres pun diputuskan oleh DPP pada tanggal 30 Desember 1975. Setelah melalui serangkaian persiapan, Kongres dapat dilaksanakan pada tanggal 11-13 April 1976. Jadi Kongres I PDI baru

---

<sup>38</sup> *Op.Cit.*, Cornelis Lay, 2003 : 14.

Peranan partai politik..., Achmad Suhawi, Pascasarjana-UI, 2008

dilaksanakan setelah tiga tahun pelaksanaan fusi. Kongres ini dilangsungkan di Jakarta dengan maksud untuk meneguhkan semangat fusi. Kongres mengesahkan piagam perjuangan, AD/ART, dan program perjuangan partai, serta penyempurnaan personalia DPP PDI. Kongres dihadiri oleh DPD PDI dari seluruh Indonesia sehingga diharapkan dapat menuntaskan permasalahan fusi, tetapi memperoleh kenyataannya yang sebaliknya.

Permasalahan berawal dari adanya perbedaan pendapat mengenai susunan personalia DPP PDI hingga melahirkan kepengurusan DPP kembar. Konflik terjadi antara Sanusi Hardjadinata dan Usep Ranawidjaja melawan Achmad Sukarmadidjaja dan Muhidin Nasution. Konflik berawal dari perbedaan pendapat mengenai pencalonan unsur PDI untuk duduk dalam jabatan pimpinan MPR / DPR. Ketika itu Mh. Isnaeni terpilih menjadi wakil ketua MPR / DPR dengan dukungan F-KP dan F-ABRI. Akan tetapi ditentang oleh lawan-lawan politiknya. Perbedaan pendapat kemudian meluas dengan digantikannya Sanusi-Usep sebagai pimpinan partai. Mereka digantikan secara sepihak oleh Mh. Isnaeni dan Soenawar Soekowati dengan cara membentuk DPP tandingan.

Munculnya DPP ganda menjadi alasan bagi pemerintah untuk melakukan intervensi. Alasan dari pemerintah untuk melakukan intervensi karena menjelang Sidang Umum MPR. Intervensi pemerintah pada persoalan intern PDI dilakukan melalui BAKIN. Dimana BAKIN (Badan Koordinasi Intelejen Negara) memfasilitasi pertemuan antara tokoh yang bertikai pada tanggal 14 dan 16 Januari 1978. Pertemuan menyetujui suatu skenario penyelesaian, dengan menyusun kembali pengurus DPP - melibatkan semua pihak yang bertikai. Skenario "penyelesaian politis 16 Januari" berhasil meredam konflik beberapa saat. Rujuk tersebut kemudian melahirkan DPP baru dengan Sanusi Hardjadinata tetap sebagai ketua umum. Setelah beberapa waktu berselang Sanusi Hardjadinata membebastugaskan Mh. Isnaeni dan Soenawar Soekowati melalui Surat Keputusan Ketua Umum No. 003/XI/1978 tanggal 24 Nopember 1978. Mh. Isnaeni dan Soenawar pun melakukan serangan balik dengan menurunkan Sanusi Hardjadinata dari kursi ketua umum. Sampai pada akhirnya situasi menjadi semakin tidak menentu.

Konflik menjadi makin meluas menjelang Kongres II. Ijin pelaksanaan Kongres yang diajukan oleh Sanusi tidak digubris oleh pemerintah. Sanusi pun mengambil langkah yang sangat mengejutkan - mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum. Melalui surat yang dia kirimkan kepada Laksamana Sudomo pada tanggal 16 Oktober 1980, Sanusi mengungkapkan bahwa moral - politiknya tidak bisa menerima apa yang

dilakukan oleh pemerintah.<sup>39</sup> Kemelut ditubuh PDI sempat mereda pasca Sanusi meninggal, akan tetapi kembali menghangat menjelang pelaksanaan Kongres II. Terjadi perbedaan pendapat antara Soenawar - Mh. Isaeni dengan “Kelompok Empat” mengenai pelaksanaan Kongres. Jika Soenawar - Mh. Isaeni mendukung pelaksanaan Kongres, maka kelompok empat sebaliknya. Mereka yang disebut kelompok empat adalah Usep Ranawidjaja, Abdul Madjid, Ny. D. Walandaouw, dan Zakaria Raib. Kelompok empat menolak pelaksanaan Kongres karena tidak sesuai dengan UU No. 3/1975, AD/ART, dan keputusan Kongres I. Menurut mereka Kongres dapat dilaksanakan bila sudah terbentuk Majelis Pertimbangan Partai dan Dewan Pertimbangan Partai seperti dalam AD/ART. Alasan lain karena pelaksanaan Kongres II masih menyebut-nyebut unsur fusi, padahal pada Kongres I sudah disebutkan bahwa unsur fusi dianggap tidak ada lagi.<sup>40</sup>

Meskipun kelompok empat sudah mengajukan keberatan atas pelaksanaan Kongres kepada pemerintah namun Kongres tetap dilaksanakan. Ijin pelaksanaan Kongres II PDI dikeluarkan oleh pemerintah. Kongres dibuka langsung oleh Presiden Soeharto. Kongres menghasilkan pengurus DPP PDI dengan Soenawar Soekowati sebagai ketua umum dan Sabam Sirait sebagai sekjen. Akan tetapi perlawanan kelompok empat berbuntut panjang. Kelompok empat, ditambah Sulomo dan Santoso Donoseputro kemudian di *recall*. Mereka pun mengajukan protes walau tidak digubris.

Menjelang Kongres III konflik kembali muncul. Perseteruan terjadi antara kubu Soenawar Soekowati dengan kubu Hardjantho Soemodisastro. Akar konflik adalah pidato Soenawar yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara sekuler. Pidato ini mendapat reaksi pro-kontra di intern PDI dan masyarakat luas. Pernyataan Soenawar pun dipakai oleh kubu Hardjantho untuk memukul kubu Soenawar. Apalagi dalam waktu yang bersamaan PDI hendak mengadakan Kongres III. Dan terjadi perbedaan mengenai waktu pelaksanaan Kongres. Soenawar menghendaki Kongres III diadakan setelah pemilihan umum (pemilu) agar pada saat pelaksanaan pemilu masih tetap memegang posisi ketua umum PDI. Akan tetapi Hardjantho menghendaki Kongres dilaksanakan sebelum pemilu dengan motivasi yang sama dengan Soenawar. Konflik pun mereda ketika Soenawar meninggal pada Januari 1986. Hardjantho merasa mendapat angin karena Kongres III dapat dilaksanakan sebelum pemilu di Wisma Haji Pondok Gede tanggal 15-17 April 1986. Akan tetapi Kongres tidak memperoleh kesepakatan mengenai

<sup>39</sup> *Op.Cit.*, Etin Nurhaelin Ningrum, 2005 : 41.

<sup>40</sup> *Op.Cit.*, Arif Zulkifli, 1996 : 61.

ketua umum PDI periode 1986-1991. Sampai pada akhirnya Kongres menemui jalan buntu sehingga pembentukan kepengurusan DPP PDI diserahkan kepada pemerintah, yaitu Departemen Dalam Negeri. Pemerintah kemudian menunjuk Drs. Soerjadi sebagai ketua umum PDI.

Pasca Kongres III PDI menunjukkan kearah penyelesaian konflik. Namun seiring dengan keinginan pemerintah akan terciptanya suatu stabilitas politik yang menjamin kelangsungan status quo, maka ambisi PDI untuk memperoleh kursi lebih banyak menjadi semacam “lampu kuning” bagi penguasa. Soerjadi memasukkan anak-anak Bung Karno sebagai *votegetter*.<sup>41</sup> Sehingga pemilu 1987 dan 1992 merupakan masa kejayaan PDI dimasa Orde Baru karena mampu meraih 44 kursi di DPR dengan lonjakan suara sebesar 58%. Perolehan suara meningkat menjadi 54 kursi DPR ketika secara resmi PDI merekrut Megawati dan Guruh Soekarnoputra sebagai *votegetter*. Karena Drs. Soerjadi dengan PDI dinilai berbahaya bagi hegemoni - kelangsungan kekuasaan maka dibuatlah suatu skenario pendongkelan.

Adalah Jenderal Feisal Tanjung yang menuding Drs. Soerjadi terlibat dalam penculikan dan penganiayaan anak buah Yusuf Merukh. Akibatnya, Drs. Soerjadi diseret ke pengadilan sehingga cacat hukum dan tidak pantas untuk memimpin partai. Kemudian serangkaian operasi dilakukan oleh penguasa. Hasilnya, “asal bukan Soerjadi” didengungkan dimana - mana. Tekad penguasa untuk mengakhiri karir politik Soerjadi dipersiapkan dengan seksama. Pendongkelan dilakukan lewat Kongres IV PDI di Medan dengan modus *deadlock* dan memunculkan “kelompok 17”.<sup>42</sup> Jadi tidak mengherankan bila untuk kesekian kalinya Kongres dipenuhi dengan intervensi penguasa. Figur pengganti Drs. Soerjadi yang dipersiapkan oleh pemerintah pada Kongres IV PDI di Medan pada 21-25 Juli 1993 adalah Budi Hardjono. Akan tetapi Soerjadi tidak menyerah begitu saja - tetap memutuskan untuk melawan. Akibatnya, Kongres pun kacau dan dinyatakan gagal oleh pemerintah. Untuk itu dibentuk pejabat sementara (*caretaker*) guna melaksanakan tugas-tugas DPP. Posisi pejabat sementara dipercayakan kepada Latief Pudjosakti dan Budi Hardjono - dengan suatu wewenang agar segera melaksanakan Kongres Luar Biasa. Agenda utama dari Kongres Luar Biasa adalah memilih ketua umum DPP PDI.

<sup>41</sup> Musa Kazhim dan Alfian Hamzah, *5 Partai Dalam Timbangan: PAN, PBB, PDI Perjuangan, PKB, PPP*, Jakarta : Pustaka Hidayah, 1999, hal. 154.

<sup>42</sup> *Op.Cit.*, Etin Nurhactin Ningrum, 2005 : 47.

Kongres IV PDI di Medan merupakan anti klimaks dari prestasi PDI dimasa Orde Baru, dimana Drs. Soerjadi sebagai ketua umum dihadang oleh kelompok 17. Kongres Luar Biasa dilaksanakan di Surabaya oleh pejabat sementara pada tanggal 2-6 Desember 1993. Akan tetapi Kongres Luar Biasa justru memunculkan figur baru yang lebih berbahaya daripada Soerjadi, yaitu Megawati Sukarnoputri. Karena situasi diluar skenario dan ekspektasi penguasa maka Kongres Luar Biasa pun di-deadlock-kan. Akan tetapi Megawati sempat menyatakan jika dirinya adalah ketua umum PDI secara *defacto* diakhir sidang. Sesuai dengan kehendak pemerintah, Latief Pudjosakti sebagai caretaker kemudian meminta pemerintah turun tangan. Untuk menyelesaikan konflik di PDI maka dilaksanakan Munas PDI pada 22-23 Desember 1993 di Jakarta. Peserta Munas secara aklamasi memilih Megawati sebagai ketua umum DPP PDI.

Kemelut ditubuh PDI tidak berakhir dengan tampilnya Megawati sebagai ketua umum. Perseteruan dengan kelompok Fatimah Achmad yang *di-back up* aparat pemerintah pun terjadi. Sementara Megawati semakin populer dikalangan arus bawah. Untuk mengimbangi popularits Megawati, pemerintah pun kembali kepada teman lama, yaitu Soerjadi. Kartu mati pun kembali dihidupkan karena sejumlah tokoh senior seperti Budi Hardjono tidak mampu mengimbangi popularitas Megawati. Puncaknya, Kongres IV kembali digelar di Medan pada 20-21 Juni 1996. Kongres memilih Soerjadi untuk kembali menjadi ketua umum secara aklamasi. Penyelenggaraan Kongres memancing kemarahan pendukung - simpatisan Megawati di beberapa kota besar. Di Jakarta terjadi bentrokan berdarah antara pendukung Megawati dengan aparat keamanan (20 Juni 1996). Dan sejak itu kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro menjadi ajang mimbar bebas bagi para pendukung Megawati. Perseteruan kemudian mencapai klimaks ketika sekelompok orang yang mengatasnamakan pendukung Kongres Medan dibantu oleh aparat keamanan merebut dengan paksa kantor DPP PDI pada tanggal 27 Juli 1996.

PDI pimpinan Megawati kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan atas kubu Soerjadi, pemerintah, dan aparat keamanan. Di tengah proses hukum yang sedang berlangsung, Megawati memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu 1997. Dengan demikian maka pemilu 1997 hanya mengakui PDI pimpinan Soerjadi untuk menjadi kontestan. Absennya PDI pimpinan Megawati pada pemilu 1997 diikuti pula oleh dukungan pada PPP atau Golput. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1998, Mahkamah Agung menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang

memeriksa dan mengadili tuntutan ketua umum PDI Megawati dan Sekretaris Jenderal Alexander Litay.<sup>43</sup>

Seiring dengan perubahan rezim, dukungan kepada PDI Perjuangan semakin besar. Angin reformasi membuka kesempatan bagi rakyat untuk menentukan pilihan politik sesuai dengan hati nurani masing-masing. Reformasi diikuti pula oleh tumbuhnya ratusan parpol. Jika DPP PDI pimpinan Soerjadi mengadakan Kongres di Palu pada 25-27 Agustus 1998 dan menjadikan Budi Hardjono sebagai ketua umum, maka PDI pimpinan Megawati mengadakan Kongres di Bali pada tanggal 8-10 Oktober 1998. Dengan demikian, secara organisasi telah terbentuk dua parpol dari akar sejarah yang sama. Pada Kongres PDI di Bali inilah muncul usulan penambahan kata “perjuangan” untuk membedakan dengan PDI pimpinan Budi Hardjono. Kongres pun memilih Megawati sebagai ketua umum dengan mandat, mencalonkan Megawati sebagai Presiden pada Sidang Umum MPR tahun 1999.<sup>44</sup>

Pada 1 Februari 1999 berdirilah PDI Perjuangan dengan badan hukum. Ia merupakan kelanjutan dari PDI yang dideklarasikan pada tanggal 10 Januari 1973. PDI Perjuangan kemudian melakukan rekrutmen kader menjelang pemilu 1999. Sejumlah aktivis Golkar diajak masuk kedalam PDI Perjuangan, misalnya saja Yacob Tobing, Tjahjo Kumolo, Postdam Hutasoit, Widjanarko Puspojo. Tidak ketinggalan pula mantan perwira TNI / Polri seperti Theo Syafie dan Sidarto.

Pasca Sidang Umum MPR tahun 1999 PDI Perjuangan mengadakan Kongres I di Semarang pada 27 Maret-1 April 2000. Keputusan mempercepat Kongres dilakukan dengan alasan, telah terjadi perubahan mendasar pada bangsa Indonesia khususnya dalam bidang politik. Beberapa persoalan yang menjadi fokus perhatian PDI Perjuangan pada Kongres I antara lain: menguatnya gejala disintegrasi; konflik horisontal; konflik vertikal; tuntutan reformasi yang belum tuntas. Walaupun Kongres sempat diwarnai dengan isu pergantian ketua umum yang dimotori oleh Dimiyati Hartono, dengan dasar argumentasi, agar Megawati berkonsentrasi pada jabatannya sebagai Wapres. Namun Kongres kembali memilih Megawati sebagai ketua umum dan mencalonkan Megawati sebagai calon Presiden pada pemilu 2004.

Lebih daripada itu, ketua umum PDI Perjuangan secara konstitusional memiliki kekuasaan yang begitu besar. Dalam pasal 20 ayat 6 dan 7 ART menyatakan bahwa ketua

<sup>43</sup> Tim Litbang Kompas, *Partai Partai Politik Indonesia*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 199, hal. 193.

<sup>44</sup> *Op.Cit.*, Etin Nurbaetia Ningrum, 2005 : 55.

umum diberi kewenangan khusus yaitu wewenang untuk melakukan langkah-langkah organisatoris dan tindakan tertentu yang bersifat luar biasa dalam rangka mempertahankan NKRI, Pancasila dan UUD 1945, dan eksistensi partai. Semua kewenangan hanya akan dipertanggungjawabkan oleh ketua umum melalui Kongres. Kewenangan ketua umum yang begitu besar membawa konsekuensi tersendiri bagi PDI Perjuangan. Bagi mereka yang tidak puas dan merasa dirugikan oleh PDI Perjuangan atau kepemimpinan Megawati maka harus memilih keluar.<sup>45</sup> Lahirnya PNBK pimpinan Eros Djarot, PITA pimpinan Dimiyati Hartono, PDP pimpinan Roy BB Janis tidak terlepas dari kondisi internal PDI Perjuangan pasca reformasi. Termasuk keluarnya beberapa tokoh seperti Sopan Sofyan.

Dalam rangka menyongsong pemilu 2009, dimana PDI Perjuangan bertekad untuk mencalonkan kembali Megawati selaku ketua umum untuk menjadi Presiden RI. PDI Perjuangan melakukan regulasi terhadap kader mereka sampai tingkat Pengurus Anak Ranting atau setingkat dusun/dukuh/RW. Pengorganisasian dilakukan secara berjenjang mengikuti administrasi pemerintahan RI sampai ketinggian pusat yang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat. Dewan Pimpinan Pusat dipimpin oleh seorang Ketua Umum, dibantu oleh seorang Sekretaris Jenderal dengan 2 (dua) orang wakil Sekjen; dan seorang Bendahara dengan 2 (dua) wakil Bendahara; serta ketua-ketua bidang yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya menjadi 3 (tiga) yaitu bidang internal, eksternal, dan fungsi pemerintahan, dimana secara keseluruhan berjumlah 19 (sembilan belas) ketua Bidang. Partai juga memiliki alat-alat kelengkapan seperti Dewan Pertimbangan Partai, Badan - badan, Komite Disiplin Partai, Fraksi dan Kesekretariatan.

### **III.2.2. PK (Sejahtera): Dari Lembaga Dakwah Kampus Menjadi Partai Politik.**

Perdebatan tentang syariat Islam selama pemerintahan Orde Baru tidak menonjol. Karena Orde Baru berhasil membuat kebijakan politik yang sangat sekuler dengan menghilangkan asas agama bagi organisasi sosial dan organisasi politik. Kebijakan sekulerisasi tersebut dikenal dengan asas tunggal. Inti daripada kebijakan asas tunggal tercantum pada TAP MPR No II/1978 yang mengharuskan semua organisasi sosial politik agar menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi seluruh organisasi sosial

---

<sup>45</sup> *Ibid*, Elin Nurhactin Ningrum, 2005 : 59.

Peranan partai politik..., Achmad Suhawi, Pascasarjana-UI, 2008



- politik di tanah air.<sup>46</sup> Akibatnya, gerakan Islam bergerak dibawah permukaan melalui kelompok-kelompok tersembunyi dan terdeferensiasi, salah satunya adalah Lembaga Dakwah Kampus.

Ditengah kondisi yang demikian, pada awal dekade 1980an gerakan-gerakan keislaman yang mengambil Musholla dan Masjid di Perguruan Tinggi mulai bersemi. Mereka mengambil Musholla dan Masjid sebagai basis operasional dan strukturnya. Gerakan-gerakan yang mereka beri nama sebagai gerakan dakwah ini mulai merebak dari tahun ke tahun. Pada 1990an aktivis dakwah kampus mengalami peningkatan secara kuantitatif. Selain itu, masih banyak simpatisan yang tidak terlibat aktif di lembaga dakwah, akan tetapi berempati kepada gerakan mereka. Rasa simpati timbul karena tindak-tanduk para aktivis dakwah yang mengedepankan sopan-santun, dan juga ramah. Perilaku yang baik tersebut diikuti pula oleh prestasi akademik yang menonjol didalam kelas. Jika pada awalnya mereka dikenal sebagai pribadi yang eksklusif, maka pandangan itu berubah seiring dengan aktivitas mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial.<sup>47</sup>

Rasa simpati - dukungan kepada aktivis lembaga dakwah semakin nyata dirasakan pada saat ada pemilihan ketua senat di kampus-kampus. Terpilihnya para aktivis dakwah sebagai pimpinan organisasi Mahasiswa semakin memudahkan mereka untuk melakukan sosialisasi secara legal. Kemenangan para aktivis lembaga dakwah dalam perebutan pimpinan organisasi kemahasiswaan tidak hanya pada PTN yang ada di Jawa, akan tetapi juga di luar Jawa. Potensi tersebut kemudian menggerakkan para aktivis dakwah kampus untuk menyatukan diri kedalam suatu wadah organisasi yang lebih rapi dan terarah. Penyatuan dilakukan secara sadar, bahwa potensi besar yang mereka miliki harus dimanfaatkan sebagai gerakan pembaharuan sistem sosial politik.<sup>48</sup>

Komunitas dakwah yang mereka tekuni sejak dekade 1980an itu sekarang mulai membiak dan menghasilkan ribuan kader. Mereka dengan giat melakukan dakwah di masyarakat dengan berbagai bentuk aktivitas seperti seminar, kajian, penyebaran pamflet, bakti sosial, dan sebagainya. Semua itu berlangsung nyaris diam-diam. Dalam arti, kegiatan mereka tidak masuk kedalam berita-berita di surat kabar maupun televisi. Dalam aktivitasnya mereka terus membicarakan masalah keagamaan, walaupun tema yang

---

<sup>46</sup> Sri Yunanto, *Demokratisasi Gerakan Fundamental Moderat Islam di Indonesia*, Tesis Magister Sains, Depok: FISIP Universitas Indonesia, 2005, hal.20.

<sup>47</sup> Mohammad Anwar, *Islam Dan Negara Dalam Perspektif Partai Keadilan Sejahtera*, Tesis Magister Sains, Jakarta: FISIP Universitas Indonesia, Depok, 2004, hal.85

<sup>48</sup> *Ibid.* Mohammad Anwar, 2004 : 87.

diangkat tidak hanya menyangkut masalah ibadah-ibadah wajib namun masalah-masalah sosial, ekonomi, kesenian dan sebagainya.<sup>49</sup>

Reformasi menghasilkan suatu kondisi yang lebih terbuka - kebebasan pers dan keleluasaan mendirikan parpol. Kondisi tersebut direspon oleh lembaga dakwah kampus untuk mendirikan parpol. Untuk itu perlu dirumuskan strategi dakwah yang lebih efektif dan sistematis dengan dilakukan secara lebih serius dan mendalam. Proses merumuskan strategi dilakukan melalui berbagai seminar dan diskusi guna memperoleh format dan bentuk gerakan yang lebih baik dan ideal dalam rangka menyikapi situasi sosial dan politik yang sudah berubah. Hasil dari curah pendapat ditindaklanjuti dengan beberapa survey dan polling pendapat yang melibatkan aktivis dakwah. Survey dan polling mereka lakukan kepada aktivis dakwah kampus yang ada diberbagai Perguruan Tinggi, baik didalam maupun luar negeri.<sup>50</sup>

Inti pertanyaan yang mereka ajukan dalam jajak pendapat tersebut adalah, bentuk apa yang akan ditampilkan untuk muncul ketengah publik pada era reformasi ini. Apakah bentuk organisasi massa (ormas), organisasi politik (orpol), atau tetap mempertahankan bentuk penampilan yang selama ini digunakan yaitu dalam berbagai bentuk yayasan dan lembaga. Poling itu ternyata cukup efektif, dari 6000 kuesioner yang disebar, kembali kurang lebih 5800 kuesioner (97%). Dan 60% lebih dari 5800 koresponden yang mengisi kuesioner menginginkan untuk mendirikan parpol. Hanya 27% saja yang menginginkan organisasi massa. Sedangkan sisanya menginginkan untuk mempertahankan dan kembali kepada habitat mereka semula, yaitu dalam bentuk yayasan, LSM, kampus, pesantren dan berbagai lembaga lainnya.<sup>51</sup>

Atas dasar hasil survey itu kemudian beberapa orang yang dianggap mewakili dan cukup representatif berkumpul. Dari 52 orang tokoh yang hadir kemudian memutuskan untuk mendirikan parpol dengan nama "Partai Keadilan". Selanjutnya ditunjuk Hidayat Nur Wahid sebagai ketua Dewan Pendiri. Menurut Rahmat Abdullah,<sup>52</sup> Partai Keadilan merupakan bentuk kepedulian aktivis dakwah sebagaimana dicanangkan dalam risalah Al-Banna. Bahwa seorang aktivis dakwah berkewajiban untuk membina dirinya sesuai dengan ajaran Islam, membentuk rumah tangga yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam,

<sup>49</sup> Kholid Novianto, *Era Baru Indonesia, Sosialisasi Pemikiran Amien Rais, Hamzah Haz, Nur Mahmudi, Matori Abdul Djamil, Yusril Ihza Mahendra*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999, hal.103-104.

<sup>50</sup> *Op.Cit.*, Mohammad Anwar, 90:2004.

<sup>51</sup> Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan*, Jakarta : Penerbit Taraju, 2002, hal 227-230.

<sup>52</sup> *Sabili*, No. 9 Th. X 2003, hal. 141.

membimbing masyarakat dan memperbaiki pemerintah serta mengembalikan eksistensi negara bagi umat Islam. Dengan demikian maka, Partai Keadilan memiliki perspektif yang serupa dengan Ikhwanul Muslimin. Sedangkan pilihan aktivis dakwah kampus untuk membentuk partai dapat dilihat dari dua hal: *pertama*, sebagai bentuk kehadiran gerakan dakwah secara utuh ditengah-tengah publik; *kedua*, dengan mendirikan parpol maka gerakan dakwah kampus sudah masuk – bergelut kedalam dunia politik praktis.<sup>53</sup>

Partai Keadilan dideklarasikan pada hari Minggu, tanggal 9 Agustus 1998 di lapangan Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan. Pada pemilu 1999 dapat mengumpulkan suara 1.436.565 atau sekitar 1,36% dari jumlah keseluruhan pemilih. Dengan demikian maka Partai Keadilan dapat menempatkan 7 orang anggotanya di DPR RI, 26 orang anggota DPRD Provinsi, dan 163 DPRD Kabupaten / Kota. Perolehan suara tersebut menjadikan Partai Keadilan tidak lulus *electoral thresshold*. Berbagai upaya dilakukan oleh Partai Keadilan namun tidak membuahkan hasil. Agar dapat menjadi kontestan pada pemilu 2004, maka ia harus menjadi partai baru atau merubah nama dan atau bergabung dengan partai lain. Alternatif yang dipilih adalah mendirikan partai baru bernama Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) untuk kemudian digabungkan dengan Partai Keadilan. Partai Keadilan pun bermetamorfosis menjadi “Partai Keadilan Sejahtera” pada tanggal 20 April 2002.<sup>54</sup> Penggabungan dilakukan atas rekomendasi Musyawarah Majelis Syuro XIII Partai Keadilan di Wisma Haji, Bekasi - Jawa Barat pada 17 April 2003.<sup>55</sup>

Organisasi PK Sejahtera dikelola – dikendalikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (*Central Board*) secara full time. Secara nasional organisasi disusun berdasarkan tingkat regional menjadi Dewan Pimpinan Wilayah (*District Board*) yang setingkat dengan Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah setingkat dengan Kabupaten / Kota, dan Dewan Pimpinan Cabang yang setingkat dengan Kecamatan. PK Sejahtera memiliki 32 Dewan Pimpinan Wilayah, 312 Dewan Pimpinan Daerah, dan 2155 Dewan Pimpinan Cabang. Disamping pengurus yang ada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, PK Sejahtera memiliki 13 perwakilan di luar negeri atau disebut dengan Pusat Informasi PK Sejahtera (PI-PKS). Sampai dengan saat ini, PK Sejahtera memiliki lebih dari 300.000 orang kader yang tercatat sebagai aktivis dan anggota. Dalam menjalankan roda

<sup>53</sup> *Op.Cit.*, Mohammad Anwar, 2004 : 92-93.

<sup>54</sup> *Ibid*, Mohammad Anwar, 2004 : 104.

<sup>55</sup> Sejarah PK Sejahtera, <http://www.pk-sejahtera.org/2006/index.php?op=isi&id=111>

organisasi dan aktivitasnya, PK Sejahtera dibingkai oleh Piagam Deklarasi, Visi dan Misi, AD/ART, Kebijakan Dasar Partai serta Peraturan - peraturan lain yang mengikat seluruh anggota partai. Dalam Visi dan Misi disebutkan bahwa:<sup>56</sup>

"Visi akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai : Partai da'wah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang; Kekuatan yang memelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang rahmatan lil alamin; Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia."

Sedangkan dalam Misi disebutkan bahwa PK Sejahtera untuk,

"Menyebarluaskan da'wah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir taghyir; Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai markaz taghyir dan pusat solusi; Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat; Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya; Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam; Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerjasama dan ishlah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan wihdatul-ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisasikan agenda reformasi; Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedhaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas"

Dari kebijakan dasar, visi dan misi tampak bahwa PK Sejahtera meyakini Islam sebagai ajaran sekaligus sistem yang komprehensif, universal, dan final. Ini menunjukkan mainstreams sekaligus paradigma yang membangun pola dan perilaku partai. Jadi tidak mengherankan jika dalam kesehariannya, bahasa, karakter, pola pikir maupun sepak terjang partai ini selalu mengidentikkan diri dengan Islam. Sebab Islam sebagai ajaran dan sistem akan selalu disebarkan dan ditransformasikan kesegnap segmen dan bidang masyarakat. Transformasi bisa dilakukan lewat berbagai macam sarana seperti ekonomi, budaya dan politik. Pilihan PK Sejahtera untuk terjun kedalam politik tidak terlepas dari kehendak tersebut.<sup>57</sup>

Dalam memperkuat pengaruhnya di masyarakat, PK Sejahtera menggunakan kebijakan-sarana sebagai berikut: *pertama*, Mengadakan kegiatan tabligh-tabligh secara luas ditengah masyarakat; *kedua*, Membina kader-kader dakwah yang mumpuni,

<sup>56</sup> Visi dan Misi, <http://www.pk-sejahtera.org/2006/index.php?op=isi&id=110>.

<sup>57</sup> Masyud, *Negara Menurut Partai Keadila Sejahtera (PKS)*, Tesis Magister, Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2007, hal. 80-81

sehingga akan muncul kader-kader dakwah atau ulama yang disegani ditengah-tengah masyarakat; *ketiga*, Menggalang aktivis-aktivis kebajikan; *keempat*, Penumbuhan dan memberdayakan ekonomi masyarakat; *kelima*, Pengembangan Pers Masyarakat.<sup>58</sup> Sedangkan untuk mensukseskan agenda dakwah, para aktivisnya menggunakan 5 tahapan metode: *pertama*, Tabligh yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Islam kesegnap lapisan sosial; *kedua*, Ta'lim adalah pengajaran; *ketiga*, Takwin ialah pembentukan; *keempat*, Tanzim yaitu penataan; dan *kelima*, Tafis ialah pelaksanaan.<sup>59</sup> Dari sini wajar jika ada sebagian persepsi bahwa PK Sejahtera partai fundamentalis yang menerapkan kompromi pada kondisi tertentu selama situasi belum mendukung.

Untuk itu PK Sejahtera disusun sebagai organisasi kesatuan yang mengikuti administrasi pemerintah dan tersebar diseluruh Indonesia. Jangkauan yang begitu luas memerlukan satu pola kerja yang manunggal demi terjaminnya kesatuan tindakan untuk kesatuan bahasa dari seluruh aparat organisasi dengan pengurus tingkat nasional sebagai pengendalinya. Karena itu pengurus tingkat nasional disusun berdasarkan hirarki yang terdiri dari Ketua Umum (Presiden) dan Sekretaris Jenderal, dibantu oleh 7 (tujuh) Ketua-ketua Bidang dan 5 (lima) Badan. Masing-masing ketua Bidang dan Badan memiliki Sekretaris. DPP PK Sejahtera terdiri dari Bidang Pembinaan Kader, Bidang Pembinaan Wilayah, Bidang POLHUKAM, Bidang KESRA, Bidang Pemuda, Bidang EKUITEL, dan Bidang Kewanitaan. Dengan setiap bidang membawahi beberapa Departemen. Sedangkan Badan-badan yang bekerja secara lebih otonom meliputi; Badan Perencanaan Dakwah, Badan Pemenangan Pemilu, Badan Hubungan Luar Negeri, Badan Legislatif, dan Badan Kehumasan.

Dengan begitu maka perbedaan kondisi di masing-masing daerah yang sejalan dengan situasi daerah bersangkutan tidaklah menyebabkan lepasnya salah satu daerah atau bahkan seorang kader dari pantauan pengurus tingkat nasional. Sebab organisasi dikendalikan secara penuh oleh pengurus tingkat nasional. Mekanisme kerja ini berdasarkan pada sistem organisasi kesatuan dengan demokrasi penuh dalam perwakilan. Artinya, aspirasi kader partai direpresentasikan oleh anggota Majelis Syuro yang dipilih melalui pemilu raya.

<sup>58</sup> Didik Ahmadi, "Memenangkan Pemilu Melalui Pemberdayaan Ekonomi", <http://pk-sejahtera.org/modules/new/article.php?mn=6&stroid=1008>

<sup>59</sup> *Sabili*, No. 9 Th. X 2003, 140.